



Bank Sulteng

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DENGAN PERBANDINGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020)
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan, yang terdiri dari:

- | | |
|---|--------|
| - Laporan Posisi Keuangan | 1 - 2 |
| - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 3 |
| - Laporan Perubahan Ekuitas | 4 |
| - Laporan Arus Kas | 5 |
| - Catatan atas Laporan Keuangan | 6 - 73 |

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA 31 DESEMBER 2021
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Judy Koagow
Alamat Kantor : JL. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu
Jabatan : Direktur Kepatuhan

Nama : Ramiyatie
Alamat Kantor : JL. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu
Jabatan : Direktur Operasional

Untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah menyatakan bahwa:

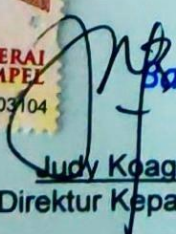
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
2. Laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun lalu yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tidak mengandung informasi atau material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
6. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Palu, 18 Februari 2022

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah




Judy Koagow
Direktur Kepatuhan


Direksi


Ramiyatie
Direktur Operasional

Alamat :

Jl. Sultan Hasanudin No. 20 Palu
Telp. (0451) 424537, 429509, 421780 Fax. (0451) 452836
Website : www.banksulteng.co.id
Sulawesi Tengah - 94112

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
00007/2.1034/AU.1/07/1162-1/1/II/2022

Kepada Yth:
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2021, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketetapan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember 2021, kinerja dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 5 Februari 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi



Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
NRAP: AP.1162

18 Februari 2022



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
Kas	2d,3	223.579.335.750	188.064.856.300
Giro pada Bank Indonesia	2e,4	349.461.255.783	188.860.688.065
Giro pada Bank Lain	2e,5	5.119.882.571	113.798.652.351
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2021 sebesar Nihil dan tahun 2020 sebesar Nihil			
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2f,6	3.146.221.769.575	2.368.300.000.000
Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2021 sebesar Nihil dan tahun 2020 sebesar Nihil			
Efek-efek	2g,7	1.543.549.706.471	808.004.432.332
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2021 sebesar Rp143.713.372 dan tahun 2020 sebesar Rp633.886.314			
Kredit yang Diberikan	2h,8		19.336.200.000
Pihak Berelasi		26.011.000.000	4.571.082.290.481
Pihak Ketiga		5.599.578.709.825	(97.959.947.285)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2c,8	<u>(96.229.982.598)</u>	<u>(97.959.947.285)</u>
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih		5.529.359.727.226	4.492.458.543.196
Aset Tetap	2i,9	107.610.134.585	107.814.373.290
setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2021 sebesar Rp75.673.976.765 dan tahun 2020 sebesar Rp64.478.496.534.			
Aset Tak Berwujud		3.061.775.100	2.869.107.834
setelah dikurangi akumulasi amortisasi tahun 2021 sebesar Rp2.078.871.900 dan tahun 2020 sebesar Rp1.670.312.166.			
Aset Pajak Tangguhan		10.944.591.540	18.861.843.377
Beban Dibayar Di Muka dan Aset Lain-lain	11	<u>82.279.034.444</u>	<u>60.614.591.461</u>
TOTAL ASET		<u>11.001.187.213.045</u>	<u>8.349.647.088.206</u>

Palu, 18 Februari 2022 


 Judy Kpadow
 Direktur Kepatuhan


 Ramiyatie
 Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Segera	12	780.970.921.529	120.610.426.051
Simpanan Nasabah	2m,13		
Pihak Berelasi		379.817.412.325	193.556.998.099
Pihak Ketiga		7.599.715.364.623	5.814.508.460.898
Simpanan dari Bank Lain	2n,14	825.000.000.000	950.000.000.000
Pinjaman yang Diterima	2m,15	67.998.512.380	46.039.166.132
Utang Pajak	2q,16	6.389.207.440	10.167.603.600
Liabilitas Imbalan Kerja	2r,31	46.443.836.764	49.729.409.589
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	17	42.261.537.509	53.437.005.512
Jumlah Liabilitas		<u>9.748.596.792.571</u>	<u>7.238.049.069.880</u>
Ekuitas			
Modal Saham	18b	426.990.000.000	426.990.000.000
Nilai nominal Rp100.000 per saham, modal dasar 17.000.000 saham, dan modal ditetapkan dan disetor penuh tahun 2021 sebanyak 4.269.900 Lembar saham dan tahun 2020 sebanyak 4.269.900 lembar saham.			
Agio Saham	18d	164.914.943.524	164.914.943.524
Dana Setoran Modal	18c	33.532.137.607	9.364.750.787
Komponen Ekuitas Lainnya			
Pendapatan Komprehensif Lainnya	19		
Keuntungan/(Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga			
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti Setelah Dikurangi/Ditambah Pajak-pajak Terkait		12.769.613.920	9.419.069.499
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya		409.374.233.127	316.499.065.452
Belum Ditentukan Penggunaannya		205.009.492.297	184.410.189.063
Jumlah Ekuitas		<u>1.252.590.420.475</u>	<u>1.111.598.018.325</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>11.001.187.213.045</u>	<u>8.349.647.088.206</u>

Palu, 18 Februari 2022


 Judy Koagow
 Direktur Kepatuhan


 Ramiyatie
 Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan Bunga	2p,21	744.274.593.028	690.186.137.838
Beban Bunga	2p,22	(214.459.344.705)	(198.302.649.633)
Pendapatan Bunga - Bersih		529.815.248.322	491.883.488.205
Pendapatan Operasional Lainnya	23	78.881.955.588	53.907.931.745
Beban Operasional			
Penyisihan/(Pemulihan) CKPN	24	899.098.116	9.764.960.117
Administrasi dan Umum	25	112.959.301.450	111.367.327.534
Tenaga Kerja	26	194.039.549.773	164.928.073.572
Lainnya	27	29.310.584.500	26.288.278.291
Jumlah Beban Operasional		337.208.533.840	312.348.639.514
Laba Operasional		271.488.670.071	233.442.780.437
Pendapatan dan Beban Non Operasional	28		
Pendapatan Non Operasional		3.802.039.385	1.850.191.068
Beban Non Operasional		(1.801.217.386)	(2.251.872.317)
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional		2.000.821.998	(401.681.249)
Laba Bersih Sebelum Pajak		273.489.492.069	233.041.099.188
Beban Pajak Penghasilan	2q,16		
Beban Pajak Kini		59.958.551.400	57.971.488.080
(Manfaat)/Beban Pajak Tangguhan		8.521.448.372	(9.340.577.955)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		68.479.999.772	48.630.910.125
Laba Tahun Berjalan		205.009.492.297	184.410.189.063
Pendapatan Komprehensif Lain			
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan/(Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga			
Keuntungan/(Kerugian) Akturial Program Manfaat Pasti		2.746.347.886	1.051.773.260
Pajak Penghasilan terkait dengan komponen OCI		604.196.535	231.390.117
(Kerugian)/Pendapatan Komprehensif Lain Periode Berjalan		3.350.544.421	1.283.163.377
Total Laba Komprehensif		208.360.036.718	185.693.352.440

Palu, 18 Februari 2022


 Judy Koagow
 Direktur Kepatuhan


 Ramiyatie
 Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Disetor	Dana		Keuntungan/ (Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga	Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	Telah Ditetapkan Penggunaannya		Belum Ditetapkan Penggunaannya	Jumlah
		Setoran Modal	Agio			Cadangan Tujuan	Cadangan Umum		
Saldo per 31 Desember 2019	366.507.700.000	91.719.525.208	129.557.595.767	1.832.997.586	8.135.906.122	21.385.155.979	276.239.788.213	126.059.947.834	1.021.438.616.709
Tambahan Setoran Modal selama tahun 2020		13.484.873.335							13.484.873.335
Peningkatan modal disetor	60.482.300.000	(60.482.300.000)							-
Agio Saham		(35.357.347.757)	35.357.347.757						-
Pembagian Laba tahun 2020:									-
Dividen								(63.029.973.917)	(63.029.973.917)
Cadangan Umum							34.666.485.654	(34.666.485.654)	-
Penyerapan CKPN PSAK 71							(31.655.852.657)		(31.655.852.657)
Cadangan Tujuan						28.363.488.263		(28.363.488.263)	-
Reklasifikasi Cadangan Tujuan ke Cadangan Umum						(30.000.000.000)	30.000.000.000		-
Pengurangan Cadangan Tujuan						(12.500.000.000)			(12.500.000.000)
Laba Bersih Setelah Pajak								184.410.189.063	184.410.189.063
Pendapatan (Beban) Komprehensif lain tahun berjalan				(1.832.997.586)	1.283.163.377				(549.834.209)
Saldo Per 31 Desember 2020	426.990.000.000	9.364.750.786	164.914.943.524	-	9.419.069.499	7.248.644.242	309.250.421.210	184.410.189.063	1.111.598.018.324
Tambahan Setoran Modal selama tahun 2021		24.167.386.821							24.167.386.821
Pembagian Laba Tahun 2021									-
Dividen								(92.205.094.531)	(92.205.094.531)
Cadangan Umum							92.205.094.532	(92.205.094.532)	-
Pengembalian CSR ke Cadangan Tujuan						670.073.143			670.073.143
Laba Bersih Setelah Pajak								205.009.492.297	205.009.492.297
Pendapatan (Beban) Komprehensif lain tahun berjalan					3.350.544.421				3.350.544.421
Saldo Per 31 Desember 2021	426.990.000.000	33.532.137.607	164.914.943.524	-	12.769.613.920	7.918.717.385	401.455.515.742	205.009.492.297	1.252.590.420.475

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	738.397.805.016	684.030.517.182
Pembayaran Bunga	(214.459.344.705)	(198.302.649.634)
Pembayaran Kepada Karyawan	(194.039.549.773)	(151.647.422.135)
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(103.085.226.172)	(66.178.956.886)
Penerimaan Pendapatan Lainnya	82.683.994.973	55.758.122.813
Pembayaran Beban Lainnya	(31.111.801.886)	(26.947.383.450)
Aset dan Kewajiban Operasi	278.385.877.453	296.712.227.890
Penurunan/(Kenaikan) Aset Operasi :		
Kredit Yang Diberikan	(1.036.070.317.460)	(584.680.621.640)
Aset Lain-lain	(15.787.654.972)	(44.332.996.200)
Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas Operasi:		
Liabilitas Segera	660.360.495.478	(9.730.416.629)
Beban Yang Masih Harus Dibayar	(13.790.967.686)	(14.699.506.502)
Simpanan Nasabah:		
Pihak Berelasi	186.260.414.226	(160.582.057.587)
Pihak Ketiga	1.785.206.903.725	386.757.591.285
Simpanan dari Bank Lain	(125.000.000.000)	381.000.000.000
Pembayaran Pajak Penghasilan	(64.341.144.095)	(6.455.308.073)
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.655.223.606.669	243.988.912.544
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Efek - efek	(735.545.274.140)	94.347.205.167
Pembelian Aset Tetap	(10.991.241.526)	(28.483.272.093)
Pembelian Aset Tidak berwujud	(601.227.000)	(297.300.000)
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(747.137.742.665)	65.566.633.074
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	21.959.346.249	27.679.727.248
Penambahan Modal Disetor	24.167.386.820	13.484.873.335
Pembayaran Dividen	(92.205.094.530)	(63.029.973.917)
Cadangan IT	-	(28.363.488.263)
Pendapatan Komprehensif	3.350.544.421	(1.832.997.586)
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(42.727.817.041)	(52.061.859.183)
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	865.358.046.963	257.493.686.435
Kas dan Setara Kas Awal Periode	2.859.024.196.716	2.601.530.510.281
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	3.724.382.243.680	2.859.024.196.716
Kas dan Setara Kas, terdiri dari		
Kas	223.579.335.750	188.064.856.300
Giro Bank Indonesia	349.461.255.783	188.860.688.065
Giro Pada Bank Lain	5.119.882.571	113.798.652.351
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	3.146.221.769.575	2.368.300.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	3.724.382.243.679	2.859.024.196.716

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut "PT Bank Sulteng" atau "Bank", yang mulanya bernama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 1966 tentang Bank Pembangunan Daerah dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1999.

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 tanggal 30 April 1999 yang dibuat oleh Notaris Anand Umar Adnan, SH., berkedudukan di Palu, maka BPD Sulteng telah berubah statusnya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan bernama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, serta telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-12841 HT .01.01 TH 99 tanggal 12 Juli 1999 dan telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri No. 584.52-442 tanggal 10 Mei 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No. 02 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/29/KEP.GBI/1999 tanggal 10 Desember 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris Baso Mappatoba, S.H., M.Kn No. 55 tanggal 8 Juni 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pendirian Bank adalah untuk mendorong pertumbuhan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu alat kegiatan ekonomi di bidang keuangan/perbankan untuk pengelolaan sumber pendapatan asli daerah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 4) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 5) Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya;
- 6) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- 7) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku;
- 8) Membantu Pemda dalam membina BPR milik Pemda Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten;
- 9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Jaringan Kantor

Bank berkantor pusat di Jl. Hasanuddin Nomor 20 Palu, Sulawesi Tengah. Bank mengklasifikasikan Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Unit Pelayanan. Jumlah kantor dan jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Kantor Pusat	1	1
Kantor Cabang Utama	1	1
Kantor Cabang	13	13
Kantor Cabang Pembantu	10	9
Kantor Kas	7	8
Kantor Fungsional Non Operasional	1	1
Kantor Pelayanan Kas (Payment Point)	34	33
Kantor Kas Mobil berjalan (Service Mobile)	14	16
Anjungan Tunai Mandiri	116	114
Jumlah	197	196

d. Manajemen Eksekutif

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

	2021	2020
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama/Independen	-	Drs. Abdul Karim Hanggi
Komisaris Independen	Amiludin Haludin	Amiludin Haludin
Komisaris	-	-
Komisaris	-	-
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	-	Rahmat Abdul Haris
Direktur Operasional	-	Ir. Darmizal Aladin
Direktur Bisnis	-	Salma Butudoka
Direktur Kepatuhan	Ir. Judy Koagow	Ir. Judy Koagow

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Manajemen Eksekutif

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun susunan keanggotaan komite-komite tersebut adalah sebagai berikut:

	2021	2020
<u>Komite Audit</u>		
Ketua	-	Drs. Abdul Karim Hanggi
Anggota	Muliati	Muliati
Anggota	Dahlan Lasaki	Dahlan Lasaki
<u>Komite Pemantau Risiko</u>		
Ketua	Amiludin Haludin	Amiludin Haludin
Anggota	-	Syafruddin Sunumpole
Anggota	Dr.H.Muhtar Lutfi, SE,M.Si	Bambang Setiawan
<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u>		
Ketua	Amiludin Haludin	Amiludin Haludin
Anggota	-	-
Anggota	I Gusti P.Suartika	Risdianto Iskandar

Pengangkatan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 2 Agustus 2021, Para Pemegang Saham mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	Maksy M. Sarkawi*)
Komisaris	Maimun Lawira**)
Komisaris	Tinus Nuanto**)

Direksi

Direktur Utama	Silas Djumaa*)
Direktur Operasional	Ramiyatie**)
Direktur Bisnis	Myrna Rianasari*)

*) Masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga berdasarkan POJK 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, belum dapat menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Komisaris maupun Direksi.

***) Telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali pada tanggal 16 Februari 2022 dan telah dapat menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Komisaris maupun Direksi.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan Bank disusun dengan konsep nilai historis dan atas dasar akrual, kecuali untuk beberapa hal dibawah ini:

- 1) Instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajar.
- 2) Aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar.
- 3) Liabilitas imbalan pasti diakui sebesar nilai kini liabilitas imbalan pasti dikurangi dengan aset bersih dana pensiun ditambah keuntungan aktuarial yang belum diakui dikurangi beban jasa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuarial yang belum diakui.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan Bank adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain, disajikan dalam Rupiah penuh.

c. Instrumen Keuangan

1) Aset Keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Bank menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model bisnis Bank dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Bank menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon). Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian kredit biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Bank menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1) Aset Keuangan (lanjutan)

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada Fair Value through Profit Loss (FVTPL).

Penilaian model bisnis

Bank menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Bank mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Bank tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasian diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini ditujukan untuk Instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Aset keuangan yang diklasifikasikan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah dimiliki untuk mencadangkan liabilitas asuransi Entitas Anak yang diukur pada nilai wajar dari aset terkait. Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal, biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, penjualan instrumen keuangan dan pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang dicatat di akun pendapatan dari kelompok diperdagangkan - neto.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1) Aset Keuangan (lanjutan)

b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dividen dari Instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

c) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

2) Liabilitas Keuangan

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas Keuangan(lanjutan)

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai pendapatan dari kelompok diperdagangkan - neto. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat diakun pendapatan kelompok diperdagangkan - neto.

Jika Bank pada pengakuan awal telah menetapkan instrumen utang tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar), maka selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam pendapatan kelompok diperdagangkan - neto. Beban Bunga dari liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat diakun pendapatan kelompok diperdagangkan - neto.

b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Bank mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- Kontrak jaminan keuangan.
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar.
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai "Beban bunga".

3) Hapus Buku

Dalam hal penghapusbukuan aset keuangan merupakan kelanjutan dari Tindakan penyelesaian aset keuangan dengan cara pengambilalihan agunan, maka jumlah yang dihapus buku adalah sebesar selisih kurang antara nilai wajar agunan yang diambil alih setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan dengan nilai tercatat aset keuangan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

3) Hapus Buku (lanjutan)

Aset keuangan dapat dihapus buku apabila cadangan kerugian penurunan nilai telah dibentuk 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat aset keuangan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

4) Reklasifikasi Aset Keuangan

Bank tidak melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Bank tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank mereklasifikasi aset keuangan dari diukur pada nilai wajar jika aset keuangan tersebut tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat.

5) Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- a) Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- b) Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya. Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

5) Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset dan liabilitas dan identik.

Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung atau secara tidak langsung.

Level 3 : Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

6) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (incurred loss) dalam PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss).

Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

a) Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan

b) Instrumen keuangan lainnya yang risikonya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risikonya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode beralian.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

6) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar tidak mengurangi nilai tercatat di dalam aset keuangan di laporan posisi keuangan.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan.

Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar tidak dilakukan penilaian penurunan nilai sesuai PSAK 71.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan Kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a) Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- b) Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c) Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- d) Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, Bank mengelompokkan aset keuangan kedalam 3 stage sebagai berikut:

- Stage 1 : mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk instrumen-instrumen keuangan ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan. Aset keuangan di dalam stage 1 termasuk fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan dapat direklasifikasi dari stage 2.
- Stage 2 : mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa risiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk instrumen-instrumen ini, akan berlaku perhitungan ECL Seumur Hidup. ECL Seumur Hidup adalah kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. Stage 2 juga mencakup fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan telah direklasifikasi dari Stage 3.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

6) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (lanjutan)

Stage 3 : mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Kelompok ini biasanya terdiri atas debitur yang mengalami gagal bayar. Bank mencatat cadangan ECL Seumur Hidup.

Evaluasi penurunan nilai didasarkan pada konsep Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

Bank menggunakan metode migration analysis untuk setiap group kredit per-Bank (Bankwide) berdasarkan data historis tunggakan selama 5 tahun dalam menentukan PD.

Bank menggunakan metode (i) Historical, (ii) Diminish Balance dan (iii) Value to Loan dalam menentukan nilai LGD dari setiap debitur. LGD menggambarkan persentase nominal fasilitas yang tidak akan dapat direcover oleh Bank terhadap debitur default. LGD biasa dihitung dengan 1-Recovery Rate. Recovery rate dihitung mempertimbangkan Time Value of Money dari pengembalian dari kewajiban yang telah default. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung Time Value of Money dari Recovery adalah EIR awal.

Pengukuran ECL berdasarkan PSAK 71 mewajibkan Bank untuk memodelkan ECL sesuai dengan skenario forward-looking yang ada, dengan mempertimbangkan kemungkinan ekonomi baik dan buruk. Oleh karena itu, nilai ECL yang dihasilkan Bank harus berdasarkan hasil probabilitas dari tiga skenario (kasus ekonomi normal/normal, baik/good, dan buruk/bad). PD dan LGD akan dihitung menurut tiga skenario dengan nilai makro-ekonomi sesuai dengan skenario-skenario tersebut. Untuk segmentasi beragunan (secured), LGD juga akan dihitung berdasarkan tiga skenario ketika data sudah mencukupi. Bobot dari skenario baik, normal dan buruk dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan diskresi Bank.

d. Kas dan Setara Kas

Kas (terutama terdiri dari kas di kasanah dan kas di ATM) dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

e. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Deposit Facility, Term Deposit dan Deposit Facility Syariah, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (inter-bank call money), deposito berjangka, dan banker's acceptance.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain (lanjutan)

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

g. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat sesuai dengan klasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Efek-efek dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Bila terjadi penjualan atau reklasifikasi dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo yang (a) belum mendekati tanggal jatuh tempo, (b) sebelum diperolehnya jumlah pokok aset keuangan secara substansial dan (c) bukan kejadian yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas akan menyebabkan reklasifikasi atas semua efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo ke dalam kelompok tersedia untuk dijual, dan Bank tidak diperkenankan untuk mengklasifikasikan efek-efek sebagai dimiliki hingga jatuh tempo untuk tahun berjalan dan untuk kurun waktu dua tahun mendatang.

Cadangan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai.

h. Kredit Yang Diberikan

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Kredit Yang Diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai kini penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan.

i. Aset Tetap

Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", Bank memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mengukur Aset Tetapnya. Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method). Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method). Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

	<u>Metode</u>	<u>Umur Ekonomis</u>	<u>Persentase</u>
Bangunan:			
Bangunan Permanen	Garis Lurus	20 Tahun	5%
Bangunan Non Permanen	Garis Lurus	10 Tahun	10%
Bukan Bangunan:			
Kelompok I	Saldo Menurun Berganda	4 Tahun	50%
Kelompok II	Saldo Menurun Berganda	8 Tahun	25%
Kelompok III	Saldo Menurun Berganda	16 Tahun	12,5%
Kelompok IV	Saldo Menurun Berganda	20 Tahun	10%

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai sisa tetap ditelaah minimal setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian terhadap beban penyusutan tahun berjalan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi dan disusutkan. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang telah dijual dikeluarkan dari kelompok Aset Tetap yang bersangkutan, dan atas laba atau rugi yang diperoleh/diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun yang bersangkutan.

Jumlah tercatat Aset Tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai Perolehan Tanah adalah semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, antara lain, biaya perizinan, biaya dan pengukuran lokasi, biaya dan pajak-pajak yang berhubungan dengan hal tersebut, ditanggungkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan hak atas tanah yang ditanggungkan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Lain-Lain" dalam laporan posisi keuangan, dan diamortisasi selama masa manfaat hak atas tanah yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus dan juga menyatakan bahwa hak atas tanah tidak diamortisasi kecuali memenuhi kondisi-kondisi tersebut yang telah ditentukan.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila Aset Tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan dan disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap. Akumulasi harga perolehan akan direklasifikasi ke masing masing Aset Tetap pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan, dan penyusutan mulai dibebankan pada saat itu.

Sewa

Sejak 1 Januari 2020 Bank menerapkan PSAK 73: Sewa untuk seluruh sewa dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas terkait, dengan 2 pengecualian yaitu aset pendasar bernilai rendah dan sewa jangka pendek.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Pada tanggal inepsi suatu kontrak, Bank menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Bank menilai apakah:

- 1) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian;
- 2) Bank memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- 3) Bank memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dalam bentuk:
 - a) Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset.
 - b) Bank mempunyai hak untuk menetapkan tujuan apa aset akan digunakan

Pada tanggal inepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Bank mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- 1) Pembayaran lunas dimuka;
- 2) Pembayaran angsuran tetap;
- 3) Pembayaran angsuran sewa berubah yang bergantung pada fluktuasi pembayaran sewa yang ditetapkan oleh counter part.

Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bunga inkremental sewa mengacu pada cost corporate bond Bank dan tingkat suku bunga pinjaman entitas anak.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

j. Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset tak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang dibeli Bank.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

k. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Bank menerapkan secara prospektif PSAK No.48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

PSAK No.48 (Revisi 2014) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas akan membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan atas penurunan nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasilan kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilai pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Bank menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dibuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar

Kerugian penurunan nilai dari operasi berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya dan mensyaratkan manajemen Bank untuk menelaah nilai aset untuk setiap penurunan dan penghapusan ke nilai wajar jika keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat tidak bisa diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

l. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Biaya dibayar di muka (lanjutan)

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas sewa yang terbentuk dari transaksi sewa sesuai PSAK 73 diklasifikasikan sebagai liabilitas segera. Liabilitas sewa tersebut akan diamortisasi sesuai periode kontrak sewa.

m. Simpanan Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

n. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan interbank call money.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang jumlahnya signifikan dan dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

o. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih cepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif awal.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (impairment) dan pendapatan bunga tersebut akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

q. Pajak Penghasilan

Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan".

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi laporan keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan yang telah diakui sebelumnya

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Bank mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

r. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, insentif dan imbalan jangka pendek lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang duka dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi kriteria. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang Undang Tenaga Kerja No. 13/2003.

Bank memiliki program pensiun imbalan pasti untuk karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Sulteng yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.49/SK/BPD-ST/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-836/KM.10/2011 tanggal 14 November 2011 dan telah diubah berdasarkan SK Direksi No.50/SK/BPD-ST/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.Kep-566/NB.1/2015 tanggal 17 November 2015.

Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

Beban liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode vesting). Dalam hal ini biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode vesting.

Liabilitas imbalan kerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit kredit.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Imbalan Kerja (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata-rata sisa tahun jasa pegawai yang telah memenuhi kriteria.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya jumlah program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu, Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas imbalan pensiun yang disediakannya.

Program imbalan jangka panjang lainnya

Diluar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan yang bersifat jangka panjang lainnya, yaitu meliputi penghargaan masa kerja, dan uang duka, penghargaan akhir masa jabatan direksi dan komisaris dan tunjangan hari tua pegawai dan direksi.

Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa kerja, dan uang duka, penghargaan akhir masa jabatan direksi dan komisaris dan tunjangan hari tua pegawai dan direksi dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

Bonus dan tantiem

Bank juga memberikan bonus kepada karyawan serta tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya cadangan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah bonus yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Uang penghargaan bagi Direksi

Bank memberikan uang penghargaan kepada Direksi pada setiap akhir masa jabatannya. Besarnya uang penghargaan Direksi secara bersama-sama ditetapkan sebesar 2.5% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan. Uang penghargaan tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan

Banknya telah menerapkan standar akuntansi keuangan baru pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan, yaitu:

- 1) PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", mengatur klasifikasi dan pengukuran instrument keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- 2) PSAK No. 73, "Sewa", menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan menyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset pendasarnya (underlying assets) bernilai rendah.

PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

Bank telah mengadopsi PSAK No. 71: Instrumen Keuangan yang disahkan pada 26 Juli 2017 dan amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Pelunasan dengan Kompensasi Negatif yang disahkan pada 29 Desember 2017 dengan tanggal penerapan awal adalah 1 Januari 2020. PSAK No. 71 ini secara signifikan mengubah PSAK No. 55: Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengakuan, terutama persyaratan terkait klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai.

Ringkasan utama atas dampak adopsi PSAK No. 71 terhadap kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut:

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

PSAK No. 71 memperkenalkan pengaturan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model. Klasifikasi aset keuangan secara prinsip dapat dibagi menjadi 3, yaitu: diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi. PSAK No. 71 mengeliminasi klasifikasi berdasarkan PSAK No. 55 berikut: kredit yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Dalam PSAK No. 71, kontrak utama pada derivatif melekat yang masuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71 tidak dipisahkan dan dianalisis secara keseluruhan untuk menentukan klasifikasinya.

Secara garis besar, PSAK No. 71 mempertahankan persyaratan PSAK No. 55 perihal klasifikasi liabilitas keuangan. Namun demikian, dalam PSAK No. 71 perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada umumnya disajikan sebagai berikut:

- 1) Nilai yang berasal dari perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan
- 2) Jumlah sisa yang berasal dari perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan disajikan dalam laba rugi.

Dalam PSAK No. 55, semua perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laba rugi.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK No. 71 memperkenalkan model kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss impairment model) yang lebih melihat ke depan dalam mengukur kerugian penurunan nilai instrumen keuangan. Berbeda dengan PSAK 55 yang mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, metode yang diperkenalkan PSAK 71 ini mensyaratkan setiap tanggal pelaporan Bank menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal menggunakan informasi forward-looking yang wajar dan terdorong.

Model kerugian kredit ekspektasian ini juga diterapkan pada komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan tertentu, serta tidak berlaku untuk instrumen ekuitas.

Transisi

Perubahan kebijakan akuntansi karena adopsi PSAK No. 71 telah diterapkan secara retrospektif, dengan pengecualian sebagai berikut:

1) Periode komparatif tidak disajikan kembali.

Selisih antara nilai tercatat aset keuangan sebagai dampak penerapan PSAK No. 71 diakui dalam saldo laba per 1 Januari 2020. Dengan demikian, periode tahun 2019 tidak mencerminkan persyaratan PSAK No. 71, sehingga tidak komparatif dengan periode tahun 2020.

2) Penilaian berikut ini dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal (1 Januari 2020):

a) Penentuan model bisnis

b) Menetapkan suatu investasi dalam instrumen ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

3) Jika risiko kredit dari instrumen keuangan tersebut dinilai rendah, maka Bank mengasumsikan bahwa risiko kredit atas aset keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak tanggal pengakuan awal.

PSAK No. 73: Sewa

Bank telah mengadopsi persyaratan PSAK No. 73. Sewa mulai 1 Januari 2020 secara retrospektif dengan dampak kumulatif sesuai dengan PSAK 73 pada Lampiran C.07. Berdasarkan opsi penerapan tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyajikan kembali dampak yang timbul akibat diterapkannya PSAK 73. Sewa yang diterapkan sebelum tanggal penerapan diungkapkan sebesar kumulatif dari sisa sewa per tanggal penerapan.

PSAK 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di neraca untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa dalam menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, taksiran-taksiran dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Klasifikasi pada investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Bank mengklasifikasikan aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi memerlukan pertimbangan signifikan untuk memiliki investasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Dalam membuat pertimbangan ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Aset keuangan tanpa harga kuotasi dalam pasar aktif

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, yaitu antara lain, apakah aset memiliki harga kuotasi atau tidak dalam pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi apakah aset keuangan memiliki kuotasi pasar dalam pasar aktif adalah penentuan apakah harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dan apakah harga tersebut merepresentasikan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang

Bank menelaah kredit yang diberikan yang signifikan secara individual dan piutang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitor dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual yang mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang penvisihan penurunan nilai tersebut.

Penurunan nilai efek dimiliki hingga jatuh tempo

Bank menelaah efek yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penurunan nilai atas investasi tersebut dinilai apakah terdapat penurunan signifikan atau berkepanjangan nilai wajar dibawah nilai perolehan atau terdapat bukti objektif telah terjadi penurunan nilai. Penentuan apa yang dimaksud dengan “signifikan” dan “berkepanjangan” membutuhkan pertimbangan dari Bank. Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Pengakuan pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal dan perbedaan temporer sampai pada batas adanya kemungkinan bahwa keuntungan yang dikenai pajak akan tersedia dimana kerugian dapat dimanfaatkan. Pertimbangan manajemen yang signifikan juga diperlukan untuk menentukan jumlah dari aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu yang mungkin terjadi dan tingkatan dari keuntungan yang dikenakan pajak di masa yang akan datang bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa yang akan datang.

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun

Biaya untuk program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja ditentukan menggunakan penilaian aktuarial. Penilaian aktuarial melibatkan pembuatan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian dari aset yang diharapkan, peningkatan gaji di masa depan, tingkat kematian dan peningkatan jumlah pensiun di masa depan. Karena sifat jangka panjang rencana-rencana ini, estimasi memiliki ketidakpastian yang signifikan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS

	2021	2020
Kas Besar	194.483.035.750	164.020.856.300
Kas ATM	29.096.300.000	24.044.000.000
Kas dalam Perjalanan	-	-
Jumlah	223.579.335.750	188.064.856.300

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2021	2020
Giro Rupiah	349.461.255.783	188.860.688.065

Giro Wajib Mimum

Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali melalui PBI No.22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No.22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, dan PBI No.23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember

PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 7 (tujuh) kali melalui PADG No.20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No.21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, PADG No.21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No.22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020, PADG No.22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No.22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020, dan PADG No.23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang menyatakan bahwa pemenuhan GWM dalam Rupiah Bank Umum Konvensional (BUK) ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dengan persentase yang wajib dipenuhi secara harian adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen). GWM dalam Rupiah untuk Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah wajib dipenuhi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen). Pemenuhan GWM dalam Rupiah baik untuk BUK maupun Entitas Anak dihitung dengan membandingkan posisi saldo rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan dana Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK dalam Rupiah selama periode

Namun terdapat pengecualian pengenaan sanksi GWM untuk peserta BI-Fast yang telah menyediakan dana BI-FAST berlaku sejak 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Perhitungan pemenuhan GWM Rupiah berdasarkan saldo rekening giro Rupiah pada BI-RTGS dan dana BI-FAST berlaku mulai tanggal 3 Januari 2022.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai remunerasi (sebelumnya disebut jasa giro) terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah. Besaran bagian tertentu yang diberikan remunerasi adalah untuk pemenuhan kewajiban GW dalam Rupiah secara harian sebesar 0% (nol persen) dan untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen). Jasa giro dimaksud diberikan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara harian dan 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Penyangga Likuiditas Makroprudensial

Penyangga Likuiditas Makroprudensial, selanjutnya disebut PLM, adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam Rupiah. Sedangkan bagi BUS, Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam Rupiah.

Pemenuhan PLM mengacu pada PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali menjadi PBI No.21/12/PBJ/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No.22/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020, dan PBI No.23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali menjadi PADG No.22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No.22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, dan PADG No.23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021, dimana besaran PLM ditentukan sebesar 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam Rupiah dan besaran PLM untuk Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah adalah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK Entitas Anak dalam Rupiah.

Rasio Intermediasi Makroprudensial

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dahulu disebut sebagai Loan to Funding Ratio (LFR). Berdasarkan PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, penyebutan LFR berubah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan kewajiban pemenuhan Giro RIM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Peraturan tersebut telah disempurnakan sebanyak 3 (tiga) kali menjadi PBI No.21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No.23/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020, dan PBI No.23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui PADG No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali menjadi PADG No.22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No.22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, dan PADG

Berdasarkan Peraturan tersebut, RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan Valuta Asing; dan
- b. Surat berharga korporasi dalam Rupiah dan Valuta Asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki Bank, terhadap:
 - 1) DPK Bank dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka/deposito dalam Rupiah dan Valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - 2) Surat berharga dalam Rupiah dan Valuta Asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - 3) Pinjaman yang diterima dalam Rupiah dan Valuta Asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.

Giro atas pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh Bank. Dalam hal RIM berada dalam kisaran Target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah. Sedangkan apabila RIM berada di luar kisaran Target RIM, maka Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan Target RIM, serta DPK dalam rupiah.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio Intermediasi Makroprudensial (lanjutan)

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan:

- a. batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- b. batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
- c. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
- d. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen);
 - 2) sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen); atau KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
 - 3) sebesar 0,1 (nol koma satu), jika Bank memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan
 - 4) sebesar 0,15 (nol koma lima belas), jika Bank memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
- e. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih besar dari atau sama dengan KPMM Insentif; atau
 - 2) sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif.

Namun penetapan ketentuan ini akan dilakukan secara bertahap kepada Bank dengan kriteria:

- a. lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- b. lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- c. lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022; dan
- d. sebesar:
 - 1) 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku untuk periode tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021; dan
 - 2) 80% (delapan puluh persen) sampai dengan lebih kecil dari 84% (delapan puluh empat persen) berlaku untuk periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka berlaku Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol).

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
GWM Harian	0,50%	0,00%
GWM Rata-rata	4,37%	3,51%
RIM	76,67%	78,66%

5. GIRO PADA BANK LAIN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Giro pada Bank Pemerintah		
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	298.679.263	2.815.695.635
PT. Bank Syariah Indonesia	104.081.432	-
PT. Bank Negara Indonesia Syariah	-	44.270.851
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	486.198.935	1.057.808.944
PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	-	21.600.402
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.137.980.220	1.123.924.014
PT. Bank Syariah Mandiri	-	38.546.533
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	556.899.203	550.806.180
Jumlah Giro pada Bank Pemerintah	<u>2.583.839.053</u>	<u>5.652.652.559</u>
Giro pada Bank Daerah		
PT. Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta	15.060.143	15.060.143
PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	76.624.398	76.624.398
Jumlah Giro pada Bank Daerah	<u>91.684.541</u>	<u>91.684.541</u>
Giro pada Bank Swasta		
PT. Bank Danamon Tbk	543.113.302	543.713.302
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	49.110.016	49.110.016
PT. Bank Mega Tbk	968.017.860	552.709.012
PT. Bank Panin Tbk	74.232.598	75.180.927
PT. Bank Muamalat Tbk	30.340.096	30.680.096
PT. Bank Sinarmas Tbk	-	634.889
PT. Bank CIMB Niaga Tbk	3.173.197	3.173.197
PT. Bank Nationalnobu Tbk	131.171.887	131.393.626
PT. Bank Mayapada Tbk	645.200.019	106.667.720.185
Jumlah Giro pada Bank Swasta	<u>2.444.358.977</u>	<u>108.054.315.251</u>
Jumlah Giro pada Bank Lain	<u>5.119.882.571</u>	<u>113.798.652.351</u>

Suku bunga efektif rata-rata setahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 1%.

Seluruh giro pada bank lain digolongkan lancar. Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai terhadap Giro Bank Sulteng pada Bank lain.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

a. Berdasarkan Jenis dan Jatuh Tempo

	Jatuh Tempo	2021	2020
Call Money Depo Facility	Januari 2022	341.900.000.000	419.300.000.000
Term Deposit	Januari 2022	2.149.321.769.575	-
Call Money	Januari 2022	605.000.000.000	50.000.000.000
Deposit on Call dan Deposito Berjangka	Januari 2022	50.000.000.000	1.899.000.000.000
Jumlah		<u>3.146.221.769.575</u>	<u>2.368.300.000.000</u>

b. Berdasarkan penerbit

	2021	2020
Bank Indonesia (Call Money Depo Facility)	341.900.000.000	419.300.000.000
Bank Indonesia (Term Deposit)	2.149.321.769.575	-
Call Money:		
PT. Bank Victoria	165.000.000.000	-
PT. Bank Sulselbar	150.000.000.000	50.000.000.000
PT. Bank Papua	140.000.000.000	-
PT. Bank Maluku	100.000.000.000	-
PT. Bank Kalimantan Timur	50.000.000.000	-
Jumlah Call money	<u>605.000.000.000</u>	<u>50.000.000.000</u>
Deposit on Call/Deposito Berjangka		
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	1.780.000.000.000
PT. Bank Mega Tbk (pihak berelasi)	50.000.000.000	-
PT. Bank Mayapada	-	119.000.000.000
Jumlah Deposit on Call/Deposito Berjangka	<u>50.000.000.000</u>	<u>1.899.000.000.000</u>
Jumlah	<u>3.146.221.769.575</u>	<u>2.368.300.000.000</u>

c. Tingkat suku bunga per tahun

	2021	2020
Call Money (Fasbi)	2,75%	3,00%
Term Deposit	2,84%	-
Interbank call money	2,86% - 3,51%	3,75% - 5,25%
Deposito berjangka	3,30%	7,65% - 7,75%
Deposit on call	-	3,85% - 4,00%

Manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain karena seluruh penempatan tersebut digolongkan lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK - EFEK

a. Berdasarkan Jenis dan Tujuan

	2021	2020
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo:		
Obligasi	33.000.000.000	32.000.000.000
Negotiable Certificate Deposit	50.000.000.000	30.000.000.000
Surat Utang Negara (Reverse Repo)	910.119.325.097	750.028.755.248
Surat Berharga Repo	553.138.422.300	-
Diskonto Yang Belum Diamortisasi	(2.564.327.554)	(3.390.436.603)
Jumlah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1.543.693.419.843	808.638.318.646
Tersedia untuk Dijual		
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Jumlah Tersedia Untuk Dijual	-	-
Jumlah Efek-Efek	1.543.693.419.843	808.638.318.646
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(143.713.372)	(633.886.314)
Jumlah Bersih Efek-Efek	1.543.549.706.471	808.004.432.332

b. Berdasarkan Penerbit

	2021	2020
Bank Indonesia		
Reverse Repo	231.357.100.000	-
Jumlah Efek Bank Indonesia	231.357.100.000	-
Bank Lain		
PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	15.000.000.000	10.000.000.000
PT. BPD Jawa Tengah	3.000.000.000	3.000.000.000
PT. Bank Lampung	5.000.000.000	5.000.000.000
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	208.831.552.000	-
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	558.138.422.300	5.000.000.000
PT. Bank Mandiri Taspen Pos	-	-
PT. Bank Victoria	5.000.000.000	5.000.000.000
PT. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	4.000.000.000
PT. BPD Nusa Tenggara Timur	20.000.000.000	30.000.000.000
PT. BPD DKI	10.000.000.000	-
PT. BPD BALI	20.000.000.000	-
Diskonto yang Belum Diamortisasi	(2.564.327.554)	(3.390.436.603)
Jumlah Efek Bank Lain	842.405.646.746	58.609.563.397
Selain Bank		
Pemerintah Republik Indonesia	469.930.673.097	750.028.755.248
Jumlah Selain Bank	469.930.673.097	750.028.755.248
Jumlah Efek-Efek	1.543.693.419.843	808.638.318.646
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(143.713.372)	(633.886.314)
Jumlah Bersih Efek-Efek	1.543.549.706.471	808.004.432.332

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK - EFEK (lanjutan)

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	2021	2020
Kurang dari 1 Tahun	1.003.223.035.133	9.441.983.056
1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	122.478.711.614	86.106.580.342
Lebih dari 5 Tahun	417.991.673.096	713.089.755.248
Jumlah	1.543.693.419.843	808.638.318.646

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2021	2020
Kurang dari 1 Tahun	1.049.858.172.458	13.441.983.056
1 Tahun sampai dengan 5 Tahun	175.674.393.730	100.106.580.342
Lebih dari 5 Tahun	318.160.853.655	695.089.755.248
Jumlah	1.543.693.419.843	808.638.318.646

e. Peringkat Obligasi

Peringkat obligasi berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	idA+	idA+
PT. BPD Jawa Tengah	idA+	idA+
PT. Bank Lampung	idA-	idA-
PT. Bank Victoria	idA-	-
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAAA	idAAA
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	idAA+
PT. BPD Nusa Tenggara Timur	-	idA-

f. Tingkat Suku Bunga

	2021	2020
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
NCD	4,25% - 7,20%	7,00% - 7,20%
Reverse Repo	3,01% - 7,55%	4,54% - 7,55%
Obligasi	6,95% - 12,25%	6,75% - 12,25%
Medium Term Note	-	-

g. Kolektabilitas

Seluruh efek-efek yang dimiliki oleh PT. Bank Sulteng pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 digolongkan dalam kolektabilitas lancar.

Seluruh efek-efek yang dimiliki dalam bentuk mata uang Rupiah.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan dengan Bank

	2021	2020
Pihak Berelasi		
Modal Kerja	-	-
Konsumsi	26.011.000.000	19.336.200.000
Jumlah Kredit Pihak Berelasi	26.011.000.000	19.336.200.000
Pihak Ketiga		
Modal Kerja	453.370.080.203	377.441.504.666
Investasi	215.151.295.126	187.163.083.700
Konsumsi	4.931.057.334.496	4.006.477.702.115
Jumlah Kredit Pihak Ketiga	5.599.578.709.825	4.571.082.290.481
Jumlah Kredit Yang Diberikan	5.625.589.709.825	4.590.418.490.481
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(96.229.982.598)	(97.959.947.285)
Jumlah Bersih	5.529.359.727.226	4.492.458.543.196

Kredit kepada pihak berelasi adalah kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria pihak terkait dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum maupun PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

b. Berdasarkan Kolektabilitas

	2021	
	Nilai Tercatat	CKPN
Lancar	5.456.711.809.227	40.273.278.485
Dalam Perhatian Khusus	93.845.133.836	16.291.348.958
Kurang Lancar	9.047.170.619	4.572.704.082
Diragukan	7.129.747.728	3.788.419.536
Macet	58.855.848.415	31.304.231.537
Jumlah	5.625.589.709.825	96.229.982.598
	2020	
	Nilai Tercatat	CKPN
Lancar	4.431.932.122.137	44.110.876.384
Dalam Perhatian Khusus	98.679.936.143	19.854.657.089
Kurang Lancar	3.638.912.975	2.193.280.195
Diragukan	7.461.784.154	5.076.893.966
Macet	48.705.735.072	26.724.239.652
Jumlah	4.590.418.490.481	97.959.947.285

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2021	2020
Pertanian	23.292.105.448	26.378.701.054
Pertambangan	101.126.260.708	34.631.648.246
Perindustrian	4.576.499.729	10.217.662.684
Perdagangan/Restoran & Hotel	97.218.839.893	132.846.523.329
Konstruksi	325.595.219.880	173.522.972.850
Pengangkutan	1.169.102.652	729.471.331
Jasa dunia usaha	317.851.195.162	295.299.255.511
Lain-lain	4.754.760.486.353	3.916.792.255.476
Jumlah	5.625.589.709.825	4.590.418.490.481
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(96.229.982.598)	(97.959.947.285)
Jumlah Bersih	5.529.359.727.226	4.492.458.543.196

Matriks kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektabilitas adalah sebagai berikut:

Sektor Ekonomi	2021						
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	CKPN	Nilai Bersih
Pertanian	18.620.190.728	750.853.970	178.020.208	445.595.287	3.297.445.255	4.965.485.399	18.326.620.049
Pertambangan	98.064.965.659	2.484.688.832	-	-	576.606.217	1.187.566.661	99.938.694.047
Perindustrian	2.136.441.959	1.122.672.074	51.459.375	31.481.110	1.234.445.211	857.269.100	3.719.230.629
Perdagangan/Restoran & Hotel	68.900.443.047	13.235.008.255	825.084.836	690.108.192	13.568.195.563	12.023.402.859	85.195.437.034
Konstruksi	287.975.930.348	23.757.667.973	2.756.861.342	269.777.023	10.834.983.194	24.920.981.650	300.674.238.230
Pengangkutan	896.805.541	28.472.214	16.527.763	16.644.442	210.652.692	93.845.598	1.075.257.054
Jasa dunia usaha	300.836.754.519	8.755.181.467	677.230.500	2.500.000	7.579.528.676	19.367.651.610	298.483.543.551
Lain-lain	4.679.280.277.426	43.710.589.051	4.541.986.595	5.673.641.674	21.553.991.608	32.813.779.721	4.721.946.706.632
Jumlah	5.456.711.809.227	93.845.133.836	9.047.170.619	7.129.747.728	58.855.848.415	96.229.982.598	5.529.359.727.226

Sektor Ekonomi	2020						
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	CKPN	Nilai Bersih
Pertanian	23.087.950.701	1.007.449.457	28.445.494	251.944.435	2.002.910.967	7.531.466.671	18.847.234.383
Pertambangan	31.769.230.338	2.423.999.990	-	-	438.417.918	2.540.878.670	32.090.769.576
Perindustrian	8.532.414.679	598.425.617	21.874.994	88.892.168	976.055.226	1.279.179.050	8.938.483.634
Perdagangan/Restoran & Hotel	105.942.906.930	13.895.913.571	389.144.695	1.056.324.386	11.562.233.748	17.606.849.747	115.239.673.583
Konstruksi	154.853.679.636	5.069.006.273	451.270.786	2.443.788.787	10.705.227.368	13.074.988.836	160.447.984.014
Pengangkutan	75.878.927	191.158.119	-	360.472.675	101.961.610	258.546.029	470.925.302
Jasa dunia usaha	278.593.154.239	10.814.360.569	532.911.097	784.138.120	4.574.691.486	12.679.413.928	282.619.841.583
Lain-lain	3.829.076.906.688	64.679.622.547	2.215.265.908	2.476.223.583	18.344.236.749	42.988.624.355	3.873.803.631.121
Jumlah	4.431.932.122.137	98.679.936.143	3.638.912.975	7.461.784.154	48.705.735.072	97.959.947.285	4.492.458.543.196

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c. Berdasarkan Jangka Waktu

Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	319.945.310.217	2.995.855.216.318
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	131.488.051.045	76.787.906.457
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	485.440.032.323	435.073.234.586
Lebih dari 5 tahun	4.688.716.316.239	1.082.702.133.120
Jumlah	<u>5.625.589.709.825</u>	<u>4.590.418.490.481</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(96.229.982.598)</u>	<u>(97.959.947.285)</u>
Jumlah Bersih	<u>5.529.359.727.226</u>	<u>4.492.458.543.196</u>

Berdasarkan Sisa Waktu Hingga Jatuh Tempo

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	361.610.039.781	3.070.506.076.580
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	215.938.325.196	153.397.704.293
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	539.037.922.671	504.029.506.406
Lebih dari 5 tahun	4.509.003.422.177	862.485.203.201
Jumlah	<u>5.625.589.709.825</u>	<u>4.590.418.490.481</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(96.229.982.598)</u>	<u>(97.959.947.285)</u>
Jumlah Bersih	<u>5.529.359.727.226</u>	<u>4.492.458.543.196</u>

d. Suku Bunga Rata-Rata

Suku bunga rata-rata atas kredit yang diberikan Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar 8,75% dan 9,24%.

e. Ikhtisar Kredit Bermasalah (NPL) Berdasarkan Sektor Ekonomi

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pertanian	3.921.060.750	2.283.300.896
Pertambangan	576.606.217	438.417.918
Perindustrian	1.317.385.696	1.086.822.388
Perdagangan/Restoran & Hotel	15.083.388.591	13.007.702.829
Konstruksi	13.861.621.559	13.600.286.941
Pengangkutan	243.824.897	462.434.285
Jasa dunia usaha	8.259.259.176	5.891.740.703
Lain-lain	31.769.619.876	23.035.726.241
Jumlah	<u>75.032.766.762</u>	<u>59.806.432.200</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f. Perubahan Cadangan Kerugian Piutang

	2021	2020
Saldo awal	97.959.947.285	63.138.083.255
Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif: (Pemulihan)/kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	-	9.764.960.117
Penyerapan Cadangan Umum	-	31.655.852.657
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(2.629.062.803)	(6.598.948.744)
Saldo akhir	<u>96.229.982.598</u>	<u>97.959.947.285</u>

g. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Kredit yang Diberikan

Mulai 1 Januari 2020, perhitungan CKPN dilakukan berdasarkan PSAK 71. Perhitungan CKPN Bank Sulteng berpedoman pada Pedoman SOP penerapan psak 71 PT.Bank Sulteng, sesuai Keputusan Direksi Bank Sulteng No. 93/BPD-ST/KDT/XI/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Pada Bulan Januari 2020 Bank Sulteng melakukan penerapan PSAK 71 dan untuk menyerap kenaikan CKPN dampak penerapan awal PSAK 71, Bank menggunakan Cadangan Umum sebesar Rp.31.655.852.657,40 sesuai SK Direksi No.10/SK-DIR/BPD-ST/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Keputusan RUPS-LB No. 33 Tanggal 4 April 2019.

Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh perbankan.

Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.

Kredit yang diberikan kepada karyawan bank merupakan kredit untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya yang dibebani bunga sebesar 7% per tahun dengan jangka waktu kredit berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dari karyawan yang bersangkutan.

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera adalah kredit dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang diterbitkan oleh Bank Sulteng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pelaku pembangunan. Kredit ini merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bank Sulteng.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Bank telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021, rasio NPL-gross dan rasio NPL-net adalah masing-masing sebesar 1.33% dan 0% sedangkan pada posisi 31 Desember 2020, rasio NPL-gross dan rasio NPL-net adalah masing-masing sebesar 1.30% dan 0% yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Pada Tahun 2021 dan 2020, Bank sulteng melakukan penghapusan kredit. Penghapusbukuan kredit tersebut bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TAK BERWUJUD

Keterangan	2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Aset Tak Berwujud	4.539.420.000	601.227.000	-	-	5.140.647.000
Jumlah	4.539.420.000	601.227.000	-	-	5.140.647.000
Akumulasi Amortisasi					
Aset Tak Berwujud	(1.670.312.166)	(408.559.734)	-	-	(2.078.871.900)
Jumlah	(1.670.312.166)	(408.559.734)	-	-	(2.078.871.900)
Nilai Buku	<u>2.869.107.834</u>				<u>3.061.775.100</u>

Keterangan	2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Aset Tak Berwujud	4.242.120.000	297.300.000	-	-	4.539.420.000
Jumlah	4.242.120.000	297.300.000	-	-	4.539.420.000
Akumulasi Amortisasi					
Aset Tak Berwujud	(1.278.462.166)	(391.850.000)			(1.670.312.166)
Jumlah	(1.278.462.166)	(391.850.000)	-	-	(1.670.312.166)
Nilai Buku	<u>2.963.657.834</u>				<u>2.869.107.834</u>

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tidak berwujud.

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAIN-LAIN

	2021	2020
Uang Muka Kepada Pihak Ketiga	21.760.000	36.100.000
Persediaan	2.521.203.478	1.398.935.799
Beban Dibayar Dimuka	9.861.164.685	9.693.052.502
Tagihan ATM Bersama	3.234.542.468	5.839.873.227
Tagihan Link Telkom	24.066.023.350	7.813.906.073
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	41.624.811.871	35.748.023.860
Aset Lainnya	949.528.592	84.700.000
Jumlah	<u>82.279.034.444</u>	<u>60.614.591.461</u>

Penjelasan atas Beban Dibayar Dimuka dan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

	2021	2020
Persediaan Barang Cetakan dan Formulir	1.161.270.552	327.255.222
Persediaan Alat Tulis Kantor	74.163.704	68.307.900
Persediaan Buku Cek dan Bilyet Giro	1.142.092.871	859.696.326
Persediaan Barang Iklan dan Promosi	143.676.352	143.676.352
Jumlah	<u>2.521.203.478</u>	<u>1.398.935.799</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Beban Dibayar di Muka

	2021	2020
Beban Sewa Gedung	4.491.650.420	2.307.977.850
Beban Sewa Mesin-mesin Kantor	464.227.060	464.227.060
Beban Asuransi Aset Tetap	50.906.225	45.924.773
Biaya Program SIMANTAP	4.441.116.277	6.874.922.818
Biaya Personalia	405.464.703	-
Biaya Inventaris	7.800.000	-
Jumlah	9.861.164.685	9.693.052.502

c. Pendapatan Bunga Yang Masih akan Diterima

	2021	2020
Bunga Kredit	30.074.200.796	23.810.973.577
Bunga Deposito Berjangka	162.927.702	289.369.863
Bunga Deposito on Call	-	566.847.222
Bunga Call Money	51.426.389	5.208.333
Lainnya	11.336.256.985	11.075.624.864
Jumlah	41.624.811.871	35.748.023.860

12. LIABILITAS SEGERA

	2021	2020
Kiriman Uang	91.675.439.731	54.142.353.504
Dana Titipan	30.008.313.493	18.957.173.204
Titipan Pajak Penghasilan	1.525.260.477	1.968.765.200
Kewajiban Pada Pihak Ketiga	46.516.930.651	25.996.112.744
Standing Instruction (SI) Gaji	39.084.211.127	2.511.105.856
Standing Instruction (SI) Kredit	412.129.377	302.710.549
Angsuran Asset Sales	395.130.079	247.407.368
Setoran Deposito Jatuh Tempo	411.600.000	462.000.000
Cadangan Remunerasi	311.905.331	230.314.143
Liabilitas Hak Aset Guna	17.491.578.964	15.792.483.483
Kewajiban atas Surat Berharga Repo	553.138.422.300	-
Jumlah	780.970.921.529	120.610.426.051

Liabilitas segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Liabilitas segera terdiri dari kiriman uang, dana titipan, dana yang sudah jatuh tempo tapi belum diambil nasabah, transaksi kliring, kewajiban pada pihak ketiga dan kewajiban wajib pungut/potong PPh.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Rincian atas liabilitas segera adalah sebagai berikut:

a. Kiriman Uang

	2021	2020
Titipan Transfer Pihak Ketiga	36.100.192.331	28.500.515.459
Titipan KU yang akan dibayar	8.100.817.601	12.116.030.801
Titipan KU via RTGS	39.415.782.072	8.148.204.825
Titipan KU via Kliring	8.052.291.726	5.367.552.420
Titipan KU Retur Kliring	6.356.000	10.050.000
Jumlah	<u>91.675.439.731</u>	<u>54.142.353.504</u>

b. Dana Titipan

	2021	2020
Titipan pihak ketiga	21.440.589.019	13.756.775.716
Titipan Pihak Ketiga Angsuran Pinjaman	208.893.620	734.614.805
Titipan Penampungan Selisih	2.966.670.557	2.287.327.998
Kas Titipan Bank Indonesia	93.662.991	6.846.564
Titipan Setoran Pajak Pihak III	2.509.608.956	30.165.435
Titipan Provisi Kredit dalam proses	3.000.000	3.000.000
Titipan antar Biro/Seksi Bank Sulteng	2.785.888.351	2.138.442.687
Jumlah	<u>30.008.313.493</u>	<u>18.957.173.204</u>

c. Titipan Pajak Penghasilan

	2021	2020
Titipan PPh Bunga Tabungan	451.017.513	505.077.018
Titipan PPh Bunga Deposito Berjangka	898.314.443	1.344.168.785
Titipan PPh Jasa Giro	31.392.109	51.437.156
Titipan PPh Pasal 21/23	89.461.210	68.082.241
Titipan PPn	55.075.202	-
Jumlah	<u>1.525.260.477</u>	<u>1.968.765.200</u>

d. Kewajiban Pada Pihak Ketiga

	2021	2020
Kewajiban ATM Bersama	25.685.143.716	17.891.078.331
Pelimpahan ATM Bersama	2.259.501.862	5.494.237.484
Kewajiban Link - Telkom	18.254.133.794	2.383.065.124
Kewajiban PLN	48.712.663	38.435.850
Kewajiban Tiket Pesawat	1.342.700	1.342.700
Kewajiban Payment Telkomsel	206.423.944	142.041.039
Kewajiban BPD Net Online	2.632.000	2.632.000
Kewajiban Biller ATM	32.184.102	33.251.032
Laku Pandai	-	65.000
Titipan Kewajiban Fee Samolnas	30.500	18.000
Multibiler Emobile	26.781.290	9.946.184
Titipan Kewajiban Qris	38.292	-
Titipan Fee admin Digital Ekosistem	5.788	-
Jumlah	<u>46.516.930.651</u>	<u>25.996.112.744</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. SIMPANAN NASABAH

a. Berdasarkan jenis

	2021	2020
Pihak Berelasi:		
Giro	377.663.955.552	190.306.290.183
Tabungan		
- Simantap	1.437.843.876	2.629.627.054
- Simpeda	615.286.933	403.288.033
- PNS	54.084.098	34.359.073
- Tabunganku	8.454.734	8.008.889
- Tabungan Simantap 3 In 1	15.387.131	95.524.868
- Siswa Plus	22.400.000	79.900.000
Jumlah Pihak Berelasi	379.817.412.325	193.556.998.099
Pihak Ketiga:		
Giro	1.868.128.812.087	1.235.667.924.523
Tabungan		
- Simantap	66.634.877.563	79.158.352.003
- Tabungan Lokal	2.860.278	9.386.920
- Simpeda	623.529.409.931	568.512.357.378
- Tabunganku	100.907.471.285	107.008.060.046
- Tabungan PNS	522.089.230.578	416.269.477.077
- Tabungan Pensiunku	12.635.204.844	13.521.857.325
- TabunganKU Plus	39.407.414.428	55.756.316.577
- Tabungan Siswa	24.243.012.501	20.456.147.175
- Tabungan Siswa plus	9.423.551.326	8.820.107.709
- Tabungan Simpel	6.419.261.507	6.542.990.171
- Tabungan Simantap 3 In 1	205.198.545.963	181.626.894.256
Deposito	4.121.095.712.334	3.121.158.589.739
Jumlah Pihak Ketiga	7.599.715.364.623	5.814.508.460.898
Jumlah Simpanan	7.979.532.776.948	6.008.065.458.997

b. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

	2021	2020
Deposito Berjangka:		
- 1 bulan	814.101.773.933	579.306.343.904
- 3 bulan	1.588.269.214.500	1.506.033.914.500
- 6 bulan	357.419.725.000	674.030.725.000
- 12 bulan	1.361.304.998.901	361.787.606.335
Jumlah	4.121.095.712.334	3.121.158.589.739

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

c. Deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

	2021	2020
Deposito Berjangka:		
- 1 bulan	937.294.923.158	738.442.493.129
- 3 bulan	1.511.696.261.698	1.391.905.907.194
- 6 bulan	1.359.629.846.076	704.505.527.156
- 12 bulan	312.474.681.402	286.304.662.260
Jumlah	<u>4.121.095.712.334</u>	<u>3.121.158.589.739</u>

d. Tingkat Suku Bunga

	2021	2020
Giro	0,35% - 2,40%	1% - 2,50%
Tabungan	0,00% - 2,50%	0,25% - 2,75%
Deposito	1,00% - 7,00%	1,00% - 7,75%

Simpeda adalah produk tabungan dari Bank Pembangunan Daerah yang memberikan jasa bunga yang dihitung dari saldo rata-rata harian dengan memberikan hadiah yang diundi secara nasional.

Simantap adalah produk tabungan khusus dari PT Bank Sulteng dengan memberikan jasa bunga yang dihitung dari saldo rata-rata harian namun tidak menawarkan hadiah.

TabunganKu adalah produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan antara lain tanpa biaya administrasi yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2014 Bank Sulteng mengeluarkan produk baru yaitu Tabungan Siswa dan Tabungan Siswa Plus. Tabungan ini merupakan produk turunan dari TabunganKu yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang dikembangkan lagi oleh Bank Sulteng. Tabungan Siswa Plus ini memiliki jangka waktu minimal 2 tahun.

PT Bank Sulteng mengeluarkan produk baru untuk jenis tabungan yang dituangkan dalam Memo No. 02/BPD-ST/DIR/XV-A/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Mandatory Produk Tabungan PNS dan PensiunKu.

Tabungan PNS adalah produk tabungan untuk perorangan yang disyaratkan hanya kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/Kota/Kabupaten se-Sulawesi Tengah.

Tabungan PensiunKu adalah produk tabungan untuk perorangan yang disyaratkan hanya kepada Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Negara, Hakim, Pensiun PNS Ex Pengadilan, Pensiun PNS Ex Departemen Perhubungan pada PT KAI, TNI dan Polri, serta Penerima Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran PKRI dan KNIP.

Pada tahun 2015 Bank Sulteng mengeluarkan produk baru yaitu Tabungan Simpel. Tabungan SimPel adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Pada tahun 2016 Bank Sulteng mengeluarkan program baru yaitu Tabungan Simantap 3 in 1. Tabungan Simantap 3 in 1 merupakan program yang dikeluarkan oleh Bank Sulteng dengan memberikan 3 manfaat dalam 1 rekening, dimana nasabah menerima 3 manfaat (rate, cash back, gift).

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

14. SIMPANAN BANK LAIN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Call Money	825.000.000.000	950.000.000.000
Jumlah	<u>825.000.000.000</u>	<u>950.000.000.000</u>

Call money pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 memiliki masa jatuh tempo kurang dari satu bulan.

Tingkat suku bunga:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Giro	-	-
Call Money	2,95% - 3,52%	3,28% - 4,00%

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

15. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima oleh PT. Bank Sulteng adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI	67.998.512.380	46.039.166.132
Jumlah	<u>67.998.512.380</u>	<u>46.039.166.132</u>

Pinjaman Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (PFLPP) adalah fasilitas liquiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pinjaman tersebut diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT Bank Sulteng Nomor 70/PKS/DP/2017 dan Nomor 118/PKS/BPD-ST/DIR/KDT/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi dalam rangka perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan jangka waktu Perjanjian Kerjasama selama 3 (Tiga) Tahun dihitung dari tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan 18 Mei 2020. Kewajiban penyetoran pokok kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan jangka waktu kredit kepada debitur. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan sebesar 0,5%.

16. PAJAK PENGHASILAN

a. Kewajiban Pajak

Saldo kewajiban pajak penghasilan Per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pajak Penghasilan Kini	59.958.551.400	57.971.488.080
Angsuran Pajak Penghasilan (Pasal 25)	(53.569.343.960)	(47.803.884.480)
Jumlah	<u>6.389.207.440</u>	<u>10.167.603.600</u>

b. Taksiran Pajak Penghasilan

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban Pajak Kini	59.958.551.400	57.971.488.080
Beban/(Manfaat) Pajak Tangguhan	8.521.448.372	(9.340.577.955)
Jumlah	<u>68.479.999.772</u>	<u>48.630.910.125</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

b. Taksiran Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak Bank untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	273.489.492.069	233.041.099.188
Koreksi Fiskal:		
Perbedaan temporer		
Beban Jasa Produksi tahun 2021 dan 2020	21.123.545.209	27.661.528.359
Beban Tantiem tahun 2021 dan 2020	7.682.289.167	11.986.662.289
Beban Dana Kesejahteraan tahun 2021 dan 2020	-	-
Pembayaran JasPro tahun 2020 dan 2019	(27.661.528.359)	(18.908.992.152)
Pembayaran Tantiem tahun 2020 dan 2019	(11.986.662.289)	(8.193.896.599)
Pembayaran Dana Kesejahteraan tahun 2020 dan 2019	-	-
Beban Manfaat Karyawan Menurut Aktuaris	12.646.350.075	15.039.045.791
Pembayaran Iuran Manfaat Karyawan CKPN	(19.902.292.416)	3.007.227.286
Jumlah Beda Temporer	(25.419.641.618)	23.470.528.291
Perbedaan Tetap		
Beban Penyusutan Rumah Dinas	1.767.512.075	240.288.973
Beban Sewa Rumah Dinas Direksi	-	-
Beban Sewa Rumah Dinas Pemimpin Cabang	556.398.141	381.596.736
Beban Sewa Kendaraan	1.534.136.814	1.095.629.091
Beban Pemeliharaan Rumah Dinas	20.526.000	40.973.250
Beban Pembinaan Pegawai dan Keluarga	100.222.050	85.475.500
Beban Langganan Surat Kabar dan Majalah	128.015.000	134.626.000
Beban Perjamuan Tamu	787.803.353	603.390.066
Beban Rekreasi dan Olah raga	603.125.528	565.475.339
Beban Bantuan kepada Pegawai	890.390.682	334.240.792
Beban Hadiah dan Sumbangan	1.504.230.246	577.864.803
Beban Denda Pajak	37.904.572	24.016.514
Beban jamuan kepada pegawai	4.157.927.018	1.691.263.583
Beban perayaan HUT	580.394.891	129.052.876
Beban tunjangan PPh Karyawan	10.008.749.857	1.079.942.588
Beban perawatan kesehatan	1.622.017.771	5.310.000
Beban Non Operasional Lainnya	169.665.800	5.991.000
Jumlah Beda Tetap	24.469.019.798	6.995.137.111
Jumlah Koreksi Fiskal	(950.621.820)	30.465.665.403
Laba Kena Pajak	272.538.870.249	263.506.764.590
Laba Kena Pajak (Dibulatkan)	272.538.870.000	263.506.764.000

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

b. Taksiran Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2021	2020
Laba Kena Pajak (Dibulatkan)		
Perhitungan Pajak Penghasilan Kini		
Tahun 2021: 22% X Rp 272.538.870.000	59.958.551.400	-
Tahun 2020: 22% X Rp 263.506.764.000	-	57.971.488.080
Pajak Penghasilan Kini	59.958.551.400	57.971.488.080
Uang Muka Pajak (PPH Pasal 25)	(53.569.343.960)	(47.803.884.480)
Kurang Bayar Pajak (PPH Pasal 29)	6.389.207.440	10.167.603.600

Sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang (self-assesment system). Perhitungan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat berbeda dan dapat menimbulkan perubahan terhadap jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar. Perubahan jumlah kewajiban pajak akibat perhitungan kembali oleh DJP tersebut akan disesuaikan pada laporan keuangan tahun berjalan dimana perhitungan dilakukan.

c. Pajak Tangguhan

Komponen Aset/(Kewajiban) Pajak Tangguhan	2021			
	2020	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke OCI	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	2021
Jasa Produksi dan Tantiem	8.722.601.943	-	(2.385.538.380)	6.337.063.563
Imbalan Pasca Kerja	#####	604.196.535	(1.039.556.855)	#####
CKPN	(801.228.675)	-	(5.096.353.137)	(5.897.581.813)
Jumlah	#####	604.196.535	(8.521.448.372)	#####
Komponen Aset/(Kewajiban) Pajak Tangguhan	2020			
	2019	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke OCI	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	2020
Jasa Produksi dan Tantiem	6.775.722.196	-	1.946.879.747	8.722.601.943
Imbalan Pasca Kerja	#####	231.390.117	109.935.375	#####
CKPN	(8.084.991.509)	-	7.283.762.834	(801.228.675)
Jumlah	9.289.875.305	231.390.117	9.340.577.955	#####

Aset pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain adalah liabilitas yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam klasifikasi-klasifikasi akun liabilitas di atas, dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Jaminan Tender	1.320.649.774	1.320.649.774
Bunga Yang Masih Harus Dibayar	6.470.760.363	7.710.883.926
Jasa Produksi, Dana Kesejahteraan, dan Tantiem	28.804.834.378	39.648.190.650
CKPN Rekening Administratif (Longgar Tarik)	1.691.636.877	595.771.297
Lain lain	3.973.656.117	4.161.509.865
Jumlah	42.261.537.509	53.437.005.512

18. PERMODALAN

a. Modal Dasar

Pada Tahun 2014 Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp490.542.400.000 yang ditetapkan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No.05 Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Idayanti Panda, SH, M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-31166.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

Pada Tahun 2015 Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp650.000.000.000 yang ditetapkan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No.85 Tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Charles, SH, M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0936834.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

Pada Tahun 2017 Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 yang ditetapkan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No.14 Tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Notaris Charles, SH, M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0131326 Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

Pada Tahun 2020 Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp1.700.000.000.000 yang ditetapkan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No.39 Tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Baso Mappatoba, SH, M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0036281.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. PERMODALAN

b. Modal Disetor

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-302/KO.0602/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Sulteng, komposisi kepemilikan Bank Per Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp426.990.000.000.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka komposisi pemegang saham PT. BPD Sulteng untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021		
	Lembar Saham	%	Nominal Saham
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1.507.448	35,30%	150.744.800.000
Pemerintah Kota Palu	113.107	2,65%	11.310.700.000
Pemerintah Kabupaten Donggala	143.244	3,35%	14.324.400.000
Pemerintah Kabupaten Poso	171.897	4,03%	17.189.700.000
Pemerintah Kabupaten Banggai	165.048	3,87%	16.504.800.000
Pemerintah Kabupaten Tolitoli	181.943	4,26%	18.194.300.000
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	120.320	2,82%	12.032.000.000
Pemerintah Kabupaten Buol	148.407	3,48%	14.840.700.000
Pemerintah Kabupaten Morowali	99.989	2,34%	9.998.900.000
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	211.085	4,94%	21.108.500.000
Pemerintah Kabupaten Sigi	47.784	1,12%	4.778.400.000
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	121.495	2,85%	12.149.500.000
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	111.611	2,61%	11.161.100.000
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	63.106	1,48%	6.310.600.000
PT. Mega Corpora	1.063.416	24,90%	106.341.600.000
Jumlah	4.269.900	100,00%	426.990.000.000

	2020		
	Lembar Saham	%	Nominal Saham
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1.507.448	35,30%	150.744.800.000
Pemerintah Kota Palu	113.107	2,65%	11.310.700.000
Pemerintah Kabupaten Donggala	143.244	3,35%	14.324.400.000
Pemerintah Kabupaten Poso	171.897	4,03%	17.189.700.000
Pemerintah Kabupaten Banggai	165.048	3,87%	16.504.800.000
Pemerintah Kabupaten Tolitoli	181.943	4,26%	18.194.300.000
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	120.320	2,82%	12.032.000.000
Pemerintah Kabupaten Buol	148.407	3,48%	14.840.700.000
Pemerintah Kabupaten Morowali	99.989	2,34%	9.998.900.000
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	211.085	4,94%	21.108.500.000
Pemerintah Kabupaten Sigi	47.784	1,12%	4.778.400.000
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	121.495	2,85%	12.149.500.000
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	111.611	2,61%	11.161.100.000
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	63.106	1,48%	6.310.600.000
PT. Mega Corpora	1.063.416	24,90%	106.341.600.000
Jumlah	4.269.900	100,00%	426.990.000.000

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. PERMODALAN (lanjutan)

c. Dana Setoran Modal

Dana Setoran Modal merupakan tambahan setoran modal oleh para pemegang saham untuk menambah kepemilikan saham, namun belum didukung kelengkapan persyaratan modal sehingga harus dicatat pada rekening dana setoran modal sesuai pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Saldo Dana Setoran Modal per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	608.412	608.412
Pemerintah Kota Palu	2.000.127.887	2.000.127.887
Pemerintah Kabupaten Donggala	2.000.214.756	214.756
Pemerintah Kabupaten Poso	434.112	434.112
Pemerintah Kabupaten Banggai	2.000.555.471	2.000.555.471
Pemerintah Kabupaten Tolitoli	404.660	404.660
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	2.000.194.389	194.389
Pemerintah Kabupaten Buol	351.709	351.709
Pemerintah Kabupaten Morowali	3.500.295.000	295.000
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	265.985	265.985
Pemerintah Kabupaten Sigi	2.000.295.750	1.000.295.750
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	4.720.285.795	2.360.285.795
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	430.514	430.514
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	2.000.286.346	2.000.286.346
PT. Mega Corpora	13.307.386.820	-
Jumlah	<u>33.532.137.607</u>	<u>9.364.750.787</u>

Dana setoran modal tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp33.532.137.607 berasal dari setoran modal Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Sulawesi Tengah serta PT.Mega Corpora yang terdiri dari Rp.22.667.386.820 belum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan sebesar Rp.10.860.000.000 belum mendapatkan persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Agio

Per 31 Desember 2021 Agio saham yang berasal dari setoran modal Pemprov, Pemkot dan Pemkab di Wilayah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp102.748.707.580, sedangkan agio saham PT. Mega Corpora sebesar Rp62.166.235.944.

Per 31 Desember 2020 Agio saham yang berasal dari setoran modal Pemprov, Pemkot dan Pemkab di Wilayah Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp102.748.707.580, sedangkan agio saham PT. Mega Corpora sebesar Rp62.166.235.944.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. PERMODALAN (lanjutan)

d. Agio (lanjutan)

Rincian saldo agio Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	45.194.945.195	45.194.945.195
Pemerintah Kota Palu	2.347.713.440	2.347.713.440
Pemerintah Kabupaten Donggala	5.426.865.888	5.426.865.888
Pemerintah Kabupaten Poso	4.242.428.089	4.242.428.089
Pemerintah Kabupaten Banggai	5.374.895.837	5.374.895.837
Pemerintah Kabupaten Tolitoli	2.213.491.576	2.213.491.576
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	2.028.994.972	2.028.994.972
Pemerintah Kabupaten Buol	5.158.948.291	5.158.948.291
Pemerintah Kabupaten Morowali	8.890.737.015	8.890.737.015
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	6.050.214.205	6.050.214.205
Pemerintah Kabupaten Sigi	3.689.172.113	3.689.172.113
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	1.916.519.856	1.916.519.856
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	6.524.667.449	6.524.667.449
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	3.689.113.654	3.689.113.654
PT. Mega Corpora	62.166.235.944	62.166.235.944
Jumlah	<u>164.914.943.524</u>	<u>164.914.943.524</u>

Harga saham atas Dana setoran modal Pemegang Saham Tahun 2013 sampai saat ini adalah sebesar Rp158.459 per lembar saham dengan rincian Rp100.000 dibukukan sebagai Nominal saham dan Rp58.459 dibukukan sebagai Agio saham berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik "Miduk Totok" yang telah diputuskan pada RUPS-LB tanggal 12 April 2013 dan tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng No.69 tanggal 21 Juni 2013.

19. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

	2021	2020
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Surat Berharga	-	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	12.769.613.920	9.419.069.499
Jumlah	<u>12.769.613.920</u>	<u>9.419.069.499</u>

a. Keuntungan (Kerugian) nilai wajar surat berharga

Merupakan hasil Market to Market atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) Surat berharga (Reksadana) dihitung berdasarkan nilai pasar wajar (NPW).

b. Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan rata-rata sisa tahun jasa pegawai yang telah memenuhi kriteria.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

20. PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pembagian laba tahun buku 2020 dilaksanakan pada tahun 2021 berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham nomor 88 tanggal 09 Maret 2021. Sedangkan pembagian laba tahun buku 2019 dilaksanakan pada tahun 2020 berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham nomor 39 tanggal 13 Mei 2020.

Adapun alokasi pembagian laba untuk tahun-tahun tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Dividen	92.205.094.531	63.029.973.917
Cadangan Umum	92.205.094.532	34.666.485.654
Cadangan Tujuan	-	28.363.488.263
Jumlah Alokasi Laba	<u>184.410.189.063</u>	<u>126.059.947.834</u>

21. PENDAPATAN BUNGA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Penempatan pada Bank Indonesia	79.445.360.534	59.570.900.385
Penempatan pada Bank Lain	39.549.099.727	78.944.759.032
Kredit Yang Diberikan	625.280.132.767	551.670.478.421
Jumlah	<u>744.274.593.028</u>	<u>690.186.137.838</u>

22. BEBAN BUNGA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bank Indonesia		
- Lending Facility Bank Indonesia	23.392.165	-
Jumlah Beban Bunga Bank Indonesia	23.392.165	-
Bank Lain		
- Call Money	19.887.669.723	27.389.431.111
- Deposito Berjangka	472.235	-
- Giro	-	-
- Lainnya	836.754.994	-
Jumlah Beban Bunga Bank Lain	<u>20.724.896.952</u>	<u>27.389.431.111</u>
Non Bank		
- Giro	33.961.323.746	44.434.032.771
- Tabungan	21.376.575.500	20.109.023.441
- Deposito Berjangka	138.111.266.466	106.216.266.292
- Lainnya	261.889.876	153.896.019
Jumlah Beban Bunga Non Bank	<u>193.711.055.588</u>	<u>170.913.218.522</u>
Jumlah	<u>214.459.344.705</u>	<u>198.302.649.633</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2021	2020
Penerimaan bunga kredit hapus buku	10.260.616	1.473.612
Penerimaan pokok kredit hapus buku	1.811.346.452	856.767.979
Provisi Bank Garansi	1.024.648.790	1.146.757.292
Denda kredit dan deposito	8.124.733.003	4.041.227.393
Jasa penggantian Cek dan Bilyet Giro	490.160.230	111.394.600
Jasa administrasi	35.561.230.028	23.168.953.754
Jasa administrasi referensi/dukungan bank	11.300.000	77.976.500
Jasa transfer	487.606.587	417.796.073
Pendapatan Fee	29.531.355.642	22.740.973.729
Keuntungan dari penjualan efek-efek	-	-
Lainnya	1.829.314.240	1.344.610.813
Jumlah	78.881.955.588	53.907.931.745

24. PENYISIHAN (PEMULIHAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	2021	2020
Kredit yang diberikan	899.098.116	9.764.960.117
Penempatan pada Bank Lain	-	-
Jumlah	899.098.116	9.764.960.117

25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2021	2020
Beban barang dan jasa pihak ketiga	55.315.426.644	57.072.149.793
Beban sewa	13.508.698.531	3.591.288.506
Beban asuransi	16.462.955.573	15.230.507.104
Beban pemeliharaan dan perbaikan	2.317.333.772	2.277.468.737
Beban penyusutan dan amortisasi	12.280.875.300	18.507.255.552
Beban promosi	3.660.325.771	5.270.975.105
Beban perjalanan dinas	9.259.071.665	9.130.937.708
Beban pajak dan retribusi	154.614.193	286.745.028
Jumlah	112.959.301.450	111.367.327.534

26. BEBAN TENAGA KERJA

	2021	2020
Gaji dan tunjangan	67.498.913.230	43.593.387.247
Honorarium Dewan Komisaris	7.169.465.560	2.594.566.350
Lembur	1.122.708.525	891.558.950
Pembayaran lainnya ke pegawai	65.754.327.811	52.849.668.203
Jasa produksi dan kesejahteraan	28.805.834.376	39.648.190.649
Imbalan kerja	17.706.030.961	20.348.162.812
Pendidikan dan seminar	5.982.269.311	5.002.539.361
Jumlah	194.039.549.773	164.928.073.572

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

27. BEBAN LAINNYA

	2021	2020
Tenaga ahli	1.091.058.505	2.349.148.297
Beban iuran dana pensiun	887.070.762	1.137.625.629
Beban operasional lainnya	26.983.529.388	22.419.485.279
Beban dari bank lain	348.925.845	382.019.086
Jumlah	<u>29.310.584.500</u>	<u>26.288.278.291</u>

28. PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL

	2021	2020
Pendapatan Non Operasional:		
Pendapatan Non Operasional Lainnya	3.802.039.385	1.850.191.068
Jumlah	<u>3.802.039.385</u>	<u>1.850.191.068</u>
Beban Non Operasional:		
Beban Non Operasional Lainnya	(169.665.800)	(5.991.000)
Denda Laporan	(87.000.000)	(1.620.000.000)
Denda Pajak	(37.904.572)	(24.016.514)
Denda Lainnya	(2.416.768)	(24.000.000)
Hadiah dan Sumbangan	(1.504.230.246)	(577.864.803)
Jumlah	<u>(1.801.217.386)</u>	<u>(2.251.872.317)</u>
Jumlah Pendapatan/(beban) Non Operasional	<u>2.000.821.998</u>	<u>(401.681.249)</u>

29. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN KONTIJENSI

	2021	2020
KOMITMEN		
Tagihan komitmen:		
- Komitmen Kredit yang Belum Digunakan	-	-
- Lainnya	-	-
Jumlah	-	-
Liabilitas komitmen:		
- Komitmen Kredit yang Belum Ditarik	(56.414.169.653)	(64.478.609.263)
- Lainnya	-	-
Jumlah	<u>(56.414.169.653)</u>	<u>(64.478.609.263)</u>
Komitmen bersih	<u>(56.414.169.653)</u>	<u>(64.478.609.263)</u>
KONTIJENSI		
Tagihan Kontijensi:		
- Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	14.421.716.054	12.615.506.142
- Lainnya	-	-
Jumlah	<u>14.421.716.054</u>	<u>12.615.506.142</u>
Liabilitas Kontijensi:		
- Garansi yang Diterbitkan	(29.588.408.424)	(28.246.372.680)
- Lainnya	-	-
Jumlah	<u>(29.588.408.424)</u>	<u>(28.246.372.680)</u>
Kontijensi Bersih	<u>(15.166.692.370)</u>	<u>(15.630.866.538)</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN KONTIJENSI (lanjutan)

	2021	2020
LAINNYA		
- Aset Produktif yang Dihapusbukukan	56.191.649.868	55.317.889.367
- Lainnya	4.271.483.198	7.293.137.873
Jumlah Tagihan Lainnya	60.463.133.066	62.611.027.240
Jumlah Tagihan Komitmen dan Kontijensi - Bersih	(11.117.728.957)	(17.498.448.561)

31. IMBALAN PASCA KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti, tunjangan hari tua, penghargaan masa kerja, uang duka dan penghargaan pensiun, serta penghargaan akhir masa jabatan direksi, yang dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh aktuaria independen (Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto) dengan menggunakan metode projected unit credit. Perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, diperoleh dari laporan aktuaria tanggal 10

	2021	2020
Dana Pensiun	-	-
Tunjangan Hari Tua	21.757.533.956	21.969.608.172
Penghargaan Masa Kerja, Uang Duka dan Pensiun	22.332.146.551	23.616.331.499
Akhir Masa Jabatan Direksi dan Komisaris	2.354.156.257	4.143.469.918
Liabilitas Imbalan Pascar Kerja	46.443.836.764	49.729.409.589

a. Program Dana Pensiun

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah memiliki program pensiun manfaat pasti melalui Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang pesertanya meliputi setiap karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

Pendanaan program pensiun ini dibentuk dari iuran peserta sebesar 5,00% dan iuran normal dan tambahan sesuai dengan perhitungan aktuaria yang dibayarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai pendiri. Di samping itu, sumber pendanaan lainnya adalah hasil investasi Dana Pensiun. Aset Investasi dana pensiun berupa deposito berjangka.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

a. Program Dana Pensiun (lanjutan)

Berdasarkan laporan aktuaris No 167-D/PSAK/KKA-AS/II/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 untuk perhitungan Dana Pensiun. Beban (Pendapatan) Imbalan Pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Biaya Jasa kini	5.059.680.885	5.309.117.021
Biaya (Pendapatan) Netto		
a. Biaya Bunga	5.376.903.548	4.659.801.067
b. Pendapatan Bunga dari Aset	(5.537.997.810)	(5.434.440.187)
c. Bunga atas dampak batasan aset	161.094.263	774.639.120
Beban (Pendapatan) yang Diakui	5.059.680.886	5.309.117.021
 Rekonsiliasi Pendanaan:		
Nilai Kini Kewajiban	(78.703.568.409)	(74.679.215.941)
Nilai Wajar Aset	84.293.498.233	76.916.636.256
Status Pendanaan	5.589.929.824	2.237.420.315
Kewajiban transisi yang belum diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	-	-
(Laba)/Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) yang diakui akhir periode	5.589.929.824	2.237.420.315
Perubahan atas Dampak Batasan Aset	3.352.509.509	(7.326.025.609)
 Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja:		
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) awal	2.237.420.315	9.563.445.924
Pembayaran Imbalan		-
Beban (Pendapatan)	5.059.680.886	5.309.117.021
Pendapatan Komprehensif Lain	(3.299.073.990)	7.008.243.054
Iuran Pemberi Kerja	5.113.116.405	4.991.334.466
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Akhir Periode	5.589.929.824	2.237.420.315
 Jumlah yang Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas		-
Aset Sebelum Batasan Aset	5.589.929.824	2.237.420.315
Nilai kini pengembalian masa depan dan pengurangan iuran		-
Aset Setelah Batasan Aset	5.589.929.824	2.237.420.315
 Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuarial yang Diakui dalam Pendapatan Komprehensif Lain:		
	2021	2020
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	6.172.429.896	6.490.212.451
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Kewajiban	(3.577.853.750)	9.381.631.780
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Aset	439.874.023	(1.598.749.606)
Perubahan dampak batas aset	3.191.415.246	(8.100.664.729)
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Periode	6.225.865.415	6.172.429.896

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua Pegawai dan Direksi

Berdasarkan laporan aktuaris Nomor 167-B/PSAK/KKA-AS/II/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 untuk perhitungan Tunjangan Hari Tua, Beban (Pendapatan), imbalan Pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Tunjangan Hari Tua Pegawai dan Direksi

	2021	2020
Biaya Jasa Kini	2.636.183.223	2.898.747.903
Biaya Bunga	2.239.050.305	1.975.551.672
Hasil yang Diharapkan dari Aset	(635.268.909)	(578.718.789)
Beban (Pendapatan) yang diakui	<u>4.239.964.619</u>	<u>4.295.580.786</u>

Status Rekonsiliasi imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Rekonsiliasi Pendanaan		
Nilai Kini Kewajiban	(31.088.621.097)	(30.671.921.989)
Nilai Wajar Aset	9.331.087.141	8.702.313.817
Status Pendanaan	(21.757.533.956)	(21.969.608.172)
Kewajiban Transisi yang belum diakui	-	-
Biaya jasa Lalu yang belum diakui	-	-
(Laba)/Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) yang diakui akhir periode	<u>(21.757.533.956)</u>	<u>(21.969.608.172)</u>

Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

	2021	2020
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Awal	(21.969.608.172)	(17.034.547.360)
Pembayaran Imbalan	-	-
Beban (Pendapatan)	4.239.964.619	4.295.580.786
Pendapatan Komprehensif Lain	(2.243.881.236)	2.769.192.243
Iuran Pemberi Kerja	2.208.227.599	2.129.712.217
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) akhir periode	<u>(21.757.463.956)</u>	<u>(21.969.608.172)</u>

Jumlah yang Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan

	2021	2020
Liabilitas	(21.757.463.956)	(21.969.608.172)
Aset	-	-
Liabilitas Neto	<u>(21.757.463.956)</u>	<u>(21.969.608.172)</u>

Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuarial yang Diakui dalam Pendapatan Komprehensif Lainnya

	2021	2020
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	(6.511.305.790)	(9.280.498.033)
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Kewajiban	(2.744.056.361)	2.426.943.150
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Aset	500.245.125	342.249.093
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Periode	<u>(8.755.117.026)</u>	<u>(6.511.305.790)</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

c. Program Penghargaan Masa Kerja Uang Duka dan Penghargaan Pensiun

Berdasarkan laporan aktuaris Nomor 167-A/PSAK/KKA-AS/II/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 untuk perhitungan penghargaan Masa Kerja Uang Duka dan Penghargaan Pensiun, Beban (Pendapatan) imbalan pasca kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Biaya Jasa Kini	5.670.708.272	7.322.293.898
Biaya Bunga	1.700.375.868	1.742.916.140
Hasil yang Diharapkan dari Aset (Laba)/Rugi Aktuarial	-	-
Beban Jasa Lalu	-	-
a. Vested	-	-
b. Non Vested	-	-
c. Transisi	-	-
Beban (Pendapatan) yang diakui	<u>7.371.084.140</u>	<u>9.065.210.038</u>

Status Rekonsiliasi Pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Nilai Kini Kewajiban	(22.332.146.551)	(23.616.331.499)
Nilai Wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	(22.332.146.551)	(23.616.331.499)
Kewajiban transisi yang belum diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui (Laba)/Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) yang diakui akhir periode	<u>(22.332.146.551)</u>	<u>(23.616.331.499)</u>

Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja:

	2021	2020
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Awal	(23.616.331.499)	(21.517.483.215)
Pembayaran Imbalan	2.171.411.896	1.789.495.577
Beban (Pendapatan)	7.371.084.140	9.065.210.038
Pendapatan Komprehensif Lain	(6.483.857.192)	(5.176.866.177)
Iuran Pemberi Kerja	-	-
Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Akhir Periode	<u>(22.332.146.551)</u>	<u>(23.616.331.499)</u>

Jumlah yang Diakui dalam Laporan Posisi Keuangan	2021	2020
Liabilitas	(22.332.146.551)	(23.616.331.499)
Aset	-	-
Liabilitas Neto	<u>(22.332.146.551)</u>	<u>(23.616.331.499)</u>

Akumulasi (Laba)/Rugi Aktuarial yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain

	2021	2020
Pendapatan Komprehensif Lain Awal	(16.699.979.408)	(11.523.113.231)
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Kewajiban	(6.483.857.192)	(5.176.866.177)
(Laba)/Rugi Aktuarial pada Aset	-	-
Pendapatan Komprehensif Lain Akhir Periode	<u>(23.183.836.600)</u>	<u>(16.699.979.408)</u>

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31. IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Asumsi yang digunakan oleh aktuaris untuk menentukan besarnya seluruh kewajiban manfaat karyawan di atas adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Tingkat Mortalitas	GAM tahun 1971	GAM tahun 1971
Tingkat Kecatatan	0.01% per tahun	0.01% per tahun
Tingkat Pengunduran Diri	0.50% per tahun	0.50% per tahun
Tingkat Pensiun Awal	0.10% per tahun	0.10% per tahun
Selisih Usia Peserta dan Suami/istri	5 Tahun	5 Tahun
Rata-rata Kenaikan Gaji pada Masa yang akan Datang	5%	5%
Tingkat Kenaikan Manfaat Pensiun Berkala	Nihil	Nihil
Tingkat Bunga Pengukuran Kewajiban Aktuarial	4,7% - 7,5%	4,7% - 7,3%
Tingkat Bunga Pengukuran Aset Aktuarial	0% - 7,5%	0% - 7,3%
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Metode yang Digunakan	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit

32. MANAJEMEN RISIKO

PT. Bank Sulteng menerapkan manajemen risiko yang independent dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Bank Indonesia serta best practice yang diterapkan di perbankan internasional.

Kerangka pengelolaan risiko Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka ini tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri (KMRBM) agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur berbagai kebijakan agar manajemen risiko berfungsi sebagai business enabler sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor prudential principle dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan- pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh terhadap pembentukan dan pengawasan terhadap kerangka manajemen risiko Bank. Direksi telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Risiko Kredit dan Operasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memonitor kebijakan manajemen risiko Bank di area yang telah ditetapkan. Semua komite Dewan memiliki anggota eksekutif dan non-eksekutif dan melaporkan secara teratur kepada Direksi pada tanggal kegiatan mereka.

Kebijakan manajemen risiko Bank dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dihadapi oleh Bank, untuk menetapkan batas risiko dan pengendalian yang tepat, dan memantau risiko dan kepatuhan terhadap batas risiko. Kebijakan manajemen risiko dan sistem direview secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan.

Bank, melalui pelatihan dan pemeliharaan prosedur operasi standar, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang disiplin dan konstruktif, sehingga semua karyawan memahami peran dan kewajibannya masing-masing.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Komite Audit Bank bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank, dan untuk mengkaji kecukupan kerangka kerja manajemen risiko dalam kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh Bank. Komite Audit Bank dibantu oleh fungsi-fungsi internal Audit. Internal Audit melakukan review terhadap prosedur dan pengendalian manajemen risiko secara regular dan ad-hoc, hasilnya dilaporkan kepada Komite Audit Bank.

Seluruh risiko dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui penyusunan laporan Profil Risiko secara triwulan dan laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran untuk menggambarkan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank, termasuk risiko entitas anak secara konsolidasi.

a. Profil Risiko Bank

Ringkasan sesuai matriks profil risiko, yaitu sebagai berikut:

Profil Risiko	Desember 2021			Desember 2020		
	Peringkat Risiko Inherent	Peringkat Kualitas Manajemen	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inherent	Peringkat Kualitas Manajemen	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Fair	3
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Fair	3
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Fair	3
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Fair	3
Risiko Kepatuhan	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Peringkat Komposit	Low to Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Fair	3

Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi Low to Moderate dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Satisfactory, maka peringkat Profil Risiko Per Desember 2021 adalah peringkat 2 (dua).

b. Risiko Kredit

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko tersebut tergolong cukup signifikan. Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low to Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Kredit mendapatkan nilai 2 (dua).

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Sehubungan dengan terjadinya pandemi yang disebabkan oleh coronaviruses disease (COVID-19) pada awal Tahun 2020 yang memberikan dampak terhadap kemungkinan kenaikan risiko kredit. Bank mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Direksi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 30/SK-DIR/BPD-ST/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Penanganan Debitur Terdampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka penanganan khusus terhadap debitur-debitur yang terdampak Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Pelaksanaan pengawasan aktif oleh komisaris dan direksi sudah dilakukan dengan cukup baik.
- 3) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dari tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank Sulteng.
- 4) Penetapan tingkat risiko dan toleransi risiko juga harus sejalan dengan Rencana Bisnis Bank sehingga lebih terarah serta dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi risk taking unit untuk mengambil Langkah strategis yang tepat kedepannya di dalam merealisasikan ekspansi kredit, menekan peningkatan Non-Performing Loan (NPL), sehingga biaya yang timbul dalam pembentukan CKPN bisa diminimalisasi dan pencapaian profit dapat terealisasi.

Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jaminan umumnya tidak disarankan selama penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain.

Adapun Maksimum Eksposur Risiko Kredit adalah sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

	2021	2020
Bank Indonesia	349.461	188.861
Giro pada Bank Lain	5.120	113.799
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	3.146.222	2.368.300
Efek-efek	1.543.550	808.004
Kredit yang Diberikan	5.625.590	4.590.418
Jumlah - Bruto	10.669.942	8.069.382
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(96.230)	(97.960)
Jumlah - Bersih	10.573.712	7.971.422

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Garansi yang Diterbitkan	29.588.408.424	28.246.372.680
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	56.414.169.653	64.478.609.263
Jumlah - Bersih	86.002.578.077	92.724.981.943

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Ikhtisar kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2021	
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai
Pertanian	19.371.044.698	3.921.060.750
Pertambangan	100.549.654.491	576.606.217
Perindustrian	3.259.114.033	1.317.385.696
Perdagangan/Restoran & Hotel	82.135.451.302	15.083.388.591
Konstruksi	311.733.598.321	13.861.621.559
Pengangkutan	925.277.755	243.824.897
Jasa dunia usaha	309.591.935.986	8.259.259.176
Lain-Lain	4.722.990.866.477	31.769.619.876
Jumlah	<u>5.550.556.943.063</u>	<u>75.032.766.762</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(56.564.627.443)</u>	<u>(39.665.355.155)</u>
Jumlah - Bersih	<u>5.493.992.315.619</u>	<u>35.367.411.607</u>

	2020	
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai
Pertanian	24.095.400.158	2.283.300.896
Pertambangan	34.193.230.328	438.417.918
Perindustrian	9.130.840.296	1.086.822.388
Perdagangan/Restoran & Hotel	119.838.820.501	13.007.702.829
Konstruksi	159.922.685.909	13.600.286.941
Pengangkutan	267.037.046	462.434.285
Jasa dunia usaha	289.407.514.808	5.891.740.703
Lain-Lain	3.893.756.529.235	23.035.726.241
Jumlah	<u>4.530.612.058.280</u>	<u>59.806.432.200</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>(63.965.533.473)</u>	<u>(33.994.413.812)</u>
Jumlah - Bersih	<u>4.466.646.524.808</u>	<u>25.812.018.388</u>

Bank mendorong optimalisasi portofolio kredit dimana perluasan/diversifikasi kredit didasarkan pada rencana strategis Bank, kondisi ekonomi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan kredit, standar dan pelaksanaan serta pemantauan dan pengadministrasian portofolio kredit ditetapkan oleh pejabat bank. Kebijakan ini disetujui oleh Dewan Komisaris dan secara berkala diperbarui untuk memasukkan perubahan pasar dan peraturan perbankan yang baru.

Risiko inherent untuk risiko kredit berada pada posisi Low to Moderate. Berikut ini adalah rasio non-Performing Loan (NPL) Gross dan Rasio Non-Performing Loan (NPL) Netto Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020
Rasio NPL Gross	1,33%	1,30%
Rasio NPL Netto	0,00%	0,00%
Rasio KAP	0,57%	0,63%

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Rasio Kualitas Aset Produktif (KAP) merupakan rasio antara aset yang diklasifikasikan tidak produktif (AYDTP) dibandingkan dengan total aset produktif (AP). Aset yang diklasifikasikan tidak produktif merupakan rata-rata tertimbang aset berdasarkan kolektibilitas.

Risiko NPL Gross merupakan rasio antara baki debit pinjaman yang digolongkan non-performing loan (kategori kurang lancar, diragukan dan macet) dibandingkan dengan total baki debit pinjaman. Rasio NPL Netto merupakan rasio antara nilai bersih pinjaman yang digolongkan non-performing loan (kategori kurang lancar, diragukan dan macet) dibandingkan dengan baki debit pinjaman. Nilai bersih merupakan baki debit dikurangi saldo penyisihan penghapusan pinjaman.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit berada pada posisi Satisfactory. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan bisnis bank khususnya berkenaan dengan administrasi kredit telah dilakukan secara efisien dan efektif mencakup aspek perjanjian kredit, pengikatan agunan sampai dengan pengarsipan kredit baik file kredit maupun agunan kredit.
- 2) Seluruh proposal kredit telah mulai dilakukan perbaikan atas dokumen baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif serta bukti-bukti lainnya yang telah disatukan dalam arsip (file).
- 4) Dari strategi dan kebijakan prosedur yang dikeluarkan telah diperuntukkan bagi kepentingan jangka panjang dan jika strategi/kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keadaan, maka secara kontinyu akan terus dilakukan penyesuaian.
- 5) Seluruh kebijakan dan prosedur yang rencana akan diterapkan, sebelumnya telah dikaji dan mendapat rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko termasuk Kepatuhan.
- 6) Bank secara rutin telah melakukan monitoring/pemantauan terhadap seluruh portofolio kredit yang ada melalui laporan watchlist terhadap kondisi dan kualitas kredit masing-masing cabang secara bulanan, namun belum spesifik dilakukan khusus untuk debitur-debitur dengan exposure tertentu yang berpotensi bisa terjadi penurunan kualitas kredit. Kedepannya akan dilakukan review secara kontinyu perbulan atau per 3 bulanan melalui Post Mortem Review oleh Divisi Kredit minimal kepada eksposire kredit yang besar.
- 7) Bank telah menerapkan Credit Scoring melalui Aplikasi *Loan Origination System* (LOS).

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko bahwa perubahan harga pasar seperti suku bunga, akan memengaruhi pendapatan atau nilai dari instrumen keuangan.

Risiko tingkat bunga bank merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan bunga, mengingat tingkat suku bunga tersebut sesuai dengan strategi bisnis Bank. Kegiatan manajemen dalam memonitoring aset dan liabilitas bank dilakukan terhadap setiap perubahan tingkat suku bunga. Adapun pengelolaan risiko suku bunga disertai dengan pemantauan sensitivitas aset keuangan dan liabilitas bank untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga pasar.

Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat Bank memiliki posisi terbuka. Bank tidak memiliki saldo dan transaksi dalam mata uang asing. Dengan demikian, Bank tidak menghadapi risiko nilai tukar.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low to Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Pasar adalah 2 (dua). Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank, kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh Bank dari risiko pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko pasar berada pada posisi Satisfactory. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

- 1) Bank telah memperhatikan penyusunan dan penetapan toleransi risiko serta besarnya risiko yang akan diambil dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank yang tertuang dalam RBB. Namun belum dilakukan secara berkala;
- 2) Direksi telah memberikan arahan kepada setiap unit kerja dalam Menyusun kebijakan Manajemen risiko khususnya penyusunan limit risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
- 3) Pengawasan aktif Dewan Komisaris cukup memadai.
- 4) Komisaris telah mendapatkan informasi mengenai suku bunga yang diinformasikan secara berkala.

Tabel di bawah ini merupakan besaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021	2020
ASET		
Giro pada bank lain	1%	1,00%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain		
Call Money Fasbi	2,75%	3,00%
Deposito Berjangka	2,84%	7,65% - 7,75%
Deposito on Call	2,86% - 3,51%	3,85% - 4,00%
Interbank Call Money	3,30%	3,75% - 5,25%
Efek-efek		
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-
NCD	4,25% - 7,20%	7,00% - 7,20%
Surat Berharga Negara	-	-
Reverse Repo	3,01% - 7,55%	4,54% - 7,55%
Obligasi	6,95% - 12,25%	6,75% - 12,25%
Medium Term Note	-	-
Kredit yang diberikan	5% - 20%	9,24%
LIABILITAS		
Simpanan dan Nasabah		
Giro	0,35% - 2,40%	1,00% - 2,50%
Tabungan	0% - 2,75%	0,25% - 2,75%
Deposito	1% - 7%	1,00% - 7,75%
Simpanan dari Bank Lain		
Giro	0%	0,00%
Call Money	2,95 - 3,52%	3,28%-4,00%

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya (membayar kepada kreditur atau melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo). Risiko likuiditas dapat diperkecil dengan suatu perencanaan cash flow dan pengelolaan kelebihan dana yang tepat dengan tetap mengantisipasi kebutuhan dan kewajiban di masa yang akan datang. Pengelolaan likuiditas dan risiko pendanaannya diawasi oleh komite ALCO. Kebijakan risiko likuiditas merupakan tanggung jawab manajemen dan strategis yang harus diambil untuk menjamin likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ukuran utama yang digunakan oleh Bank untuk mengelola risiko likuiditas adalah rasio aset lancar bersih terhadap simpanan nasabah. Rasio aktiva lancar bersih dianggap sebagai uang tunai dan kas pada aktiva lancar dikurangi dengan simpanan dari bank (Giro pada Bank Lain).

Untuk memantau tingkat risiko likuiditas Bank melakukan analisis jatuh tempo aset dan kewajiban secara periodik.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode pada akhir tahun sampai ada jatuh tempo kontrak.

	2021					
	Saldo	<1 Bulan	1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	>12 Bulan
ASET						
Kas	223.579	223.579	-	-	-	-
Giro pada BI	349.461	349.461	-	-	-	-
Antar Bank Aktiva	3.146.222	3.146.222	-	-	-	-
Efek-efek	1.543.550	-	-	-	1.003.223	540.327
Kredit yg diberikan	5.625.590	89.984	69.047	23.369	179.185	5.264.005
Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10.888.402	3.809.246	69.047	23.369	1.182.408	5.804.331
LIABILITAS						
Simpanan	7.979.533	4.672.539	1.588.269	357.420	1.361.305	-
Antar Bank Pasiva	825.000	825.000	-	-	-	-
Pinjaman yg Diterima	67.999	-	-	-	-	67.999
Lain-lain	95.095	95.095	-	-	-	-
Jumlah	8.967.626	5.592.633	1.588.269	357.420	1.361.305	67.999
Perbedaan JT	1.920.776	(1.783.387)	(1.519.222)	(334.051)	(178.897)	5.736.333

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas

	2020					
	Saldo	<1 Bulan	1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	>12 Bulan
ASET						
Kas	188.064	188.064	-	-	-	-
Giro pada BI	188.860	188.860	-	-	-	-
Antar Bank Aktiva	2.482.099	2.482.099	-	-	-	-
Efek-efek	808.638	-	-	-	14.000	794.638
Kredit yg diberikan	4.590.418	28.110	105.343	33.796	108.955	4.314.212
Lain-lain	108.598	108.598	-	-	-	-
Jumlah	8.366.677	2.995.731	105.343	33.796	122.955	5.108.850
LIABILITAS						
Simpanan	6.008.065	2.886.967	2.127.811	706.933	286.354	-
Antar Bank Pasiva	950.000	950.000	-	-	-	-
Pinjaman yg Diterima	46.039	-	-	-	-	46.039
Lain-lain	202.726	202.726	-	-	-	-
Jumlah	7.206.830	4.039.693	2.127.811	706.933	286.354	46.039
Perbedaan JT	1.159.847	(1.043.962)	(2.022.468)	(673.137)	(163.399)	5.062.811

e. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi operasional bank. Tujuan Bank adalah untuk mengelola risiko operasional sehingga dapat menghindari kerugian keuangan dan reputasi Bank.

Adapun tanggung jawab untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional yang dapat memengaruhi kegiatan Bank, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian dan pemisahan tugas serta otorisasi transaksi bank
- 2) Pemantauan operasional bank.
- 3) Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mengontrol seluruh dokumentasi dan prosedur bank
- 5) Jika terjadi kesalahan ataupun kegagalan dalam operasional bank akan dilakukan pelaporan dan pengusulan tindakan perbaikan
- 6) Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai terhadap risiko operasional
- 7) Memitigasi risiko yang mungkin timbul

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berada pada posisi Satisfactory, pengelolaan Risiko Operasional menjadi perhatian oleh manajemen, dimana dalam pengelolaannya melalui beberapa cara antara lain:

- 1) Pengisian profil risiko melalui Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank secara rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi early warning system sehingga Bank segera mengambil Langkah-langkah mitigasi yang diperlukan;
- 2) Penerapan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menghindari risiko;
- 3) Saat ini Bank sudah memiliki sistem informasi manajemen risiko (TKB) dan Profil Risiko Cabang (PRC) yang dapat memastikan terukurnya eksposur risiko baik eksposur risiko secara keseluruhan/ komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank namun belum secara akurat, informatif, dan tepat waktu.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang disebabkan adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Dengan risiko inherent yang berada pada posisi Low to Moderate, serta kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Hukum adalah 2 (dua). Hal ini disebabkan belum adanya perkembangan atas kasus hukum yang dihadapi Bank Sulteng, tercermin dari terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank, namun frekuensi dan atau dampak financial gugatannya cukup signifikan sehingga dapat memengaruhi kondisi keuangan Bank dan dapat berdampak pada kemungkinan munculnya risiko reputasi bagi Bank. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko hukum sedang selama periode waktu tertentu di masa datang, berdasarkan bisnis Bank tanpa memperhitungkan aspek manajemen risiko

Divisi manajemen risiko melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja untuk meningkatkan budaya risiko yang di dalamnya juga termasuk risiko hukum guna meminimalisir terjadinya risiko hukum.

Permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Sulteng pada tahun 2021, antara lain:

- 1) Gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang mana sebagai penggugat Iftikar Gani dan PT. Bank BNI Cabang Sudirman Makassar (tergugat), serta PT. Bank Sulteng Cabang Kolonodale sebagai turut tergugat. Gugatan perdata ini terdaftar dengan nomor register perkara dengan nomor 115/PDT.G/2020/PN.PAL, tuntutan penggugat yaitu tergugat memulihkan nama baik penggugat yang telah melakukan pencatutan identitas penggugat secara tidak sah, dengan menerbitkan daftar tunggakan Kartu Kredit. Perkembangan kasus, gugatan ini timbul sebagai akibat dari ditolaknya permohonan kredit penggugat di Kantor PT Bank Sulteng Cabang Kolonodale karena berdasarkan SLIK tercatat sebagai debitur yang mempunyai tunggakan di Bank BNI. Gugatan ini tidak berdampak hukum pada PT. Bank Sulteng Cabang Kolonodale, perkara perdata telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap (Inckraht).
- 2) Laporan dugaan tindak pidana perbankan terkait proses pemberian kredit kepada CV. Annindo Raya pada Cabang Sigi, dengan cara mengagunkan SHM No. 512 a.n HJ. Harisia tanpa sepengetahuan pemilik/ahli waris. Permasalahan ini telah dilaporkan di Reserse Kriminal Khusus, Pelapor merupakan ahli waris dari Pemilik Sertifikat No. 512 a.n. HJ. Harisia. Ahli waris meminta sertifikat hak milik No. 512 a.n. HJ. Harisia dapat dikembalikan meminta ganti kerugian senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kasus ini telah dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat unsur pidana.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

g. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Dengan melihat Risiko Inherent yang berada pada posisi Low to Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Reputasi adalah 2 (Dua).

Risiko Inherent untuk Risiko Reputasi berada pada posisi Low Moderate, dengan beberapa parameter penilaian:

- 1) Tidak terdapat beberapa pemberitaan negatif pada periode ini, yaitu pada media masa maupun media sosial;
- 2) Tidak adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Bank;
- 3) Bank telah membentuk satuan khusus untuk menangani keluhan nasabah dan juga terus berusaha meningkatkan pelayanan Bank kepada Nasabah.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah sebagai berikut:

- 1) Bank telah memperhitungkan semua aktivitas dan dampak risiko pada setiap kegiatan operasional masing-masing divisi dengan memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan, namun dalam proses identifikasi setiap risiko bank belum melakukan pendekatan dengan menggunakan alat ukur yang memadai.
- 2) Proses pengambilan keputusan oleh direksi telah mempertimbangkan kejadian masa lalu yang berdampak atas risiko reputasi untuk melahirkan proses lengkap, akurat dan tepat waktu.
- 3) Dalam pengambilan keputusan penggunaan sistem informasi oleh bank dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko telah melalui proses seleksi secara independen melalui perjanjian kerjasama. Untuk mendukung pengambilan proses risiko yang akurat serta penggunaan sistem informasi tersebut telah didukung dengan sistem dan teknologi terbaru yang dapat diakses dengan mudah dan akurat. Namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Manajemen Risiko saat ini masih perlu untuk diberikan pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

h. Risiko Strategis

Risiko Strategis merupakan risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang tidak tepat atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal.

Risiko strategis mencakup:

- 1) Ketepatan kebijakan bidang pengkreditan, treasury maupun investasi;
- 2) Kesesuaian realisasi diversifikasi produk baik kredit maupun treasury;
- 3) Perbandingan realisasi dengan target pasar yang ditetapkan.

Dengan melihat risiko inherent yang berada pada posisi Low to Moderate, serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada posisi Satisfactory, dapat disimpulkan Peringkat Risiko untuk Risiko Strategik adalah 2 (dua), masih terdapat beberapa deviasi dari target RBB yang telah ditetapkan oleh Bank, diharapkan kedepannya kinerja Bank lebih baik lagi agar sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan oleh Bank.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

h. Risiko Strategis (lanjutan)

Sehubungan dengan terjadinya pandemic coronavirus disease (COVID-19) di Indonesia awal tahun 2020 Bank berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasari melalui Memo Internal Direksi PT. Bank Sulteng No. 967/BPD-ST/MI/DIR/KDT/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Pembentukan Team Restrukturisasi debitur terdampak Coronavirus Disease (COVID-19) dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 20/SK-DIR/BPD-ST/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Penanganan Debitur Terdampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

i. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Risiko kepatuhan mencakup:

- 1) Bidang pengkreditan, meliputi batas maksimum pemberian kredit, kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif;
- 2) Bidang treasury dan investasi, meliputi penyertaan pada bank atau LKBB;
- 3) Perpajakan;
- 4) Kelembagaan dan pelaporan atau perjanjian;
- 5) Pengenalan nasabah atau Know Your Customer (KYC).

Risiko Inherent untuk Risiko Kepatuhan berada pada posisi Moderate, dengan beberapa parameter penilaian sebagai berikut:

- 1) Fungsi kepatuhan yang kurang maksimal diterapkan di lingkungan intern Bank Sulteng sehingga kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang, hal ini terlihat pada temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Belum sepenuhnya memenuhi komitmen-komitmen atas temuan-temuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan yang diambil oleh Bank Sulteng dalam Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Bank belum sepenuhnya memiliki pedoman penempatan pejabat dan staff pada satuan kerja manajemen risiko yang sesuai sifat dan jumlah, sehingga memengaruhi produktivitas fungsional Bank.
- 2) Pejabat dan staff di satuan kerja manajemen risiko disarankan agar mengikuti pelatihan tentang manajemen risiko secara berkesinambungan.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

33. MANAJEMEN PERMODALAN

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan pasar dalam pengelolaan permodalan Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta kesamaan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Pada tanggal 31 desember 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi semua syarat permodalan yang diwajibkan.

Rasio Penyediaan Modal Minimum

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio [CAR]) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (Risk - Weighted Assets (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari modal Inti (Tier I) dan Modal Pelengkap (Tier II) dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Rasio kecukupan Modal pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (dalam jutaan)

	2021	2020
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	3.439.687	3.127.536
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	895.436	787.302
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	-	-
Total Modal	1.241.982	1.071.652
Rasio Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM)	28,65%	27,37%
Rasio Minimum menurut POJK 11/POJK.03/2016	10%	10,00%

Kegiatan alokasi modal didorong oleh optimalisasi jumlah modal yang jumlahnya tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memaksimalkan laba atas risiko yang disesuaikan dengan modal dasar yang digunakan dalam menentukan bagaimana modal dialokasikan oleh Bank pada operasional atau kegiatan tertentu. Kebijakan Bank yang berhubungan dengan pengelolaan modal dan alokasi dana diriview secara berkala oleh Direksi.

Sejak tahun 2007, Bank diwajibkan untuk memenuhi kerangka kerja Basel II dalam hal ini permodalan Bank dengan mengikuti road map implementasi Basel II di Indonesia yang dipimpin oleh Bank Indonesia.

Penerapan Bank atas risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam permodalan adalah sebagai berikut:

a. Risiko kredit

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005, Bank menggunakan pendekatan Basel I untuk mengelola risiko kredit.

Bank menerapkan pendekatan standar untuk mengelola risiko kredit mulai 1 januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011.

b. Risiko Operasional

Untuk pengelolaan risiko operasional Bank menerapkan pendekatan indicator dasar sesuai dengan Surat Edaran Ban Indonesia No 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, beban modal untuk risiko operasional sebesar 5%, 10% dan 15% dari rata-rata pendapatan kotor selama tiga tahun terakhir.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

33. MANAJEMEN PERMODALAN (lanjutan)

Bank mengklasifikasikan modal dalam 2 (dua) tingkatan:

- 1) Modal Tier 1 terdiri dari modal saham biasa, agio saham, saldo laba, selisih penjabaran laporan keuangan, dan kepentingan non pengendali setelah dikurangi goodwill dan aset tak berwujud dan penyesuaian lainnya sehubungan dengan item yang termasuk dalam modal tetapi diperlakukan secara berbeda sesuai kepentingan.
- 2) Modal Tier 2 terdiri dari pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat dan cadangan umum (maksimum 1,25% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko [ATMR]).

Bank tidak memiliki modal tambahan lainnya yang memenuhi kriteria modal tier 3 dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Berbagai Batasan diterapkan untuk unsur-unsur dari modal dasar. Pengaruh pajak tangguhan telah dikecualikan dalam menentukan jumlah laba ditahan untuk modal tier 1, hanya 50 persen dari keuntungan tahun berjalan sebelum pajak tangguhan yang termasuk dalam modal tier 1 dan kualifikasi modal tier 2 tidak dapat melebihi modal tier 1. Ada juga pembatasan pada jumlah penurunan cadangan penurunan nilai - kolektif yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

34. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 18 Februari 2022.

CONTACT US :

📍 JL. SULTAN HASANUDDIN NO 20 PALU

☎ TELP (0451) 424537, 429509, 421780

🌐 WWW. BANKSULTENG.CO.ID